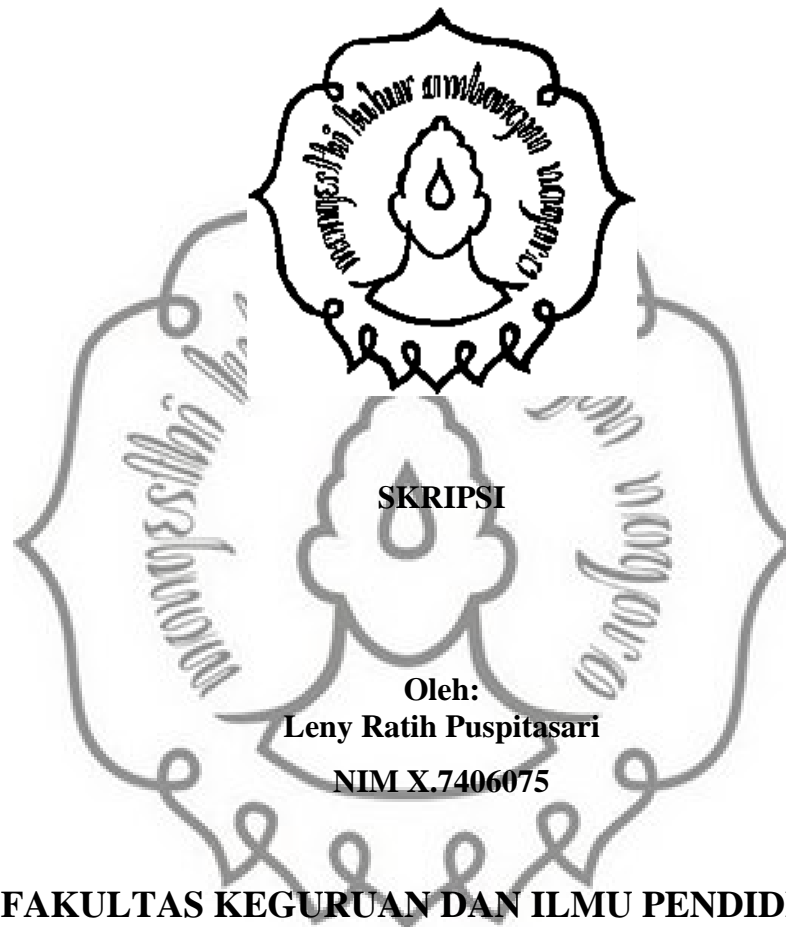


**Implementasi Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan
Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Dalam Meningkatkan Pendapatan
Pedagang Kecil Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang Tahun 2009**



SKRIPSI

**Oleh:
Leny Ratih Puspitasari
NIM X.7406075**

**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA**

2010

**IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT(PNPM) MANDIRI
PERDESAAN DALAM MENINGKATKAN
PENDAPATAN PEDAGANG KECIL
DI KECAMATAN KALIWUNGU**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang senantiasa melakukan pembangunan di segala bidang. Pembangunan yang sedang giat dilaksanakan di Negara kita dewasa ini meliputi segala aspek kehidupan yang pada hakekatnya bertujuan untuk menciptakan landasan ekonomi yang kuat bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4 dimana salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum maka diharapkan dengan hasil pembangunan tersebut dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang adil dan makmur baik materiil maupun spiritual.

Pesatnya pembangunan yang sedang dilaksanakan oleh pemerintah disegala bidang tidak lepas dari peran serta masyarakat. Hasil dari pembangunan khususnya disektor perekonomian harus dinikmati secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat. Untuk melakukan pemerataan dan hasil-hasil pembangunan, pemerintah harus dapat bersikap adil terhadap daerah-daerah, agar pembangunan dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat, sehingga tidak ada satu daerahpun yang tidak menikmati hasil pembangunan dan diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Sekarang ini, Negara Indonesia menitikberatkan pada pembangunan nasional yang menekankan pada bidang ekonomi yang merupakan penggerak utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pembangunan ekonomi adalah suatu proses yang diarahkan untuk meningkatkan standar hidup penduduk negara yang diukur dengan kenaikan pendapatan perkapita masyarakat dan mempertinggi produktivitas. Tujuan dari pembangunan ekonomi yang dikehendaki oleh masyarakat Indonesia adalah pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat sesuai dengan tingkat hidup kebutuhan serta adanya hasil-hasil pembangunan yang hasilnya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Kita melihat bahwa Produktivitas penduduk di negara Indonesia adalah rendah yang

mengakibatkan hasil produksi atau output mereka juga rendah. Dengan pembangunan ekonomi yang sedang giat dilaksanakan oleh pemerintah diharapkan output atau kekayaan masyarakat akan bertambah.

Sekarang ini masalah yang mendapat perhatian khusus dari pemerintah dalam melaksanakan pembangunan adalah kemiskinan dan pengangguran. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang teramat kompleks sekaligus tantangan yang harus dihadapi dalam pembangunan. Kemiskinan terbagai menjadi kemiskinan mutlak (*absolute proverty*) yaitu: individu atau kelompok yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya, bahkan kebutuhan fisik minimumnya, dan kemiskinan relatif (*relative proverty*) yaitu menekankan ketidaksamaan kesempatan dan kemampuan diantara lapisan masyarakat untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan dalam menikmati kehidupannya.. Persoalan pengangguran lebih dipicu oleh rendahnya kesempatan dan peluang kerja bagi angkatan kerja di perdesaan.

Daerah pedesaan merupakan sasaran dari pemerintah dalam pembangunan ekonomi karena sebagian besar penduduk Indonesia tinggal di pedesaan. Pembangunan perdesaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional yaitu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur baik material maupun spiritual yang mencakup seluruh strata masyarakat perdesaan. Penduduk di daerah perdesaan mempunyai mata pencaharian sebagai petani pada umumnya. Petani mempunyai sikap hidup dan ciri khas, sistem kerja tetap dan terus menerus merupakan kegiatan rutinitas petani. Pendapatan dari sektor pertanian rendah dan jumlahnya tidak memadai untuk mencukupi kebutuhan hidup. Pola penerimaan dan pengeluaran masyarakat perdesaan yang bersifat musiman dan sangat tergantung pada alam menyebabkan mereka mencari biaya diluar sektor pertanian.

Sekarang ini banyak petani yang tidak hanya bekerja di sawah saja, mereka berusaha untuk mendapatkan uang tambahan, salah satunya dengan berdagang. Di daerah perdesaan kebanyakan yang membuka usaha berdagang adalah para ibu rumah tangga. Berbagai macam jenis yang mereka jual, ada yang

berjualan sayur-mayur keliling desa, Pakaian keliling, makanan kecil, toko yang menjual kebutuhan sehari-hari, bahkan ada yang menjual palawija di pasar.

Pedagang merupakan salah satu bagian dari masyarakat golongan ekonomi lemah yang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari pemerintah untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meningkatkan taraf hidupnya. Sebagaimana telah diketahui setiap usaha atau kegiatan akan membutuhkan modal untuk membiayai usaha yang dijalankan. Namun, modal tersebut tidak semuanya dapat dipenuhi sendiri. Bahkan masalah modal menjadi masalah bagi mereka, lebih-lebih bagi para pedagang. Mereka mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Lemahnya permodalan yang dialami masyarakat miskin khususnya pedagang kecil tidak semata-mata disebabkan oleh kekurangan modal yang sesungguhnya, tetapi sering kali karena kurangnya pengetahuan dan kemampuan dalam mengelola modal yang mereka miliki. Dengan kurangnya modal yang dialami para pedagang tersebut akan membatasi ruang gerak aktivitas usahanya yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan.

Kebutuhan kredit modal bagi para petani perdesaan yang berdagang sebagian besar termasuk masyarakat golongan lemah sangat penting untuk membuka usaha. Namun para pedagang kecil ini sulit untuk memperoleh kredit terutama ketika mengajukan permohonan kredit di bank yang berskala besar dan umum. Bank yang berskala besar dan umum mempunyai prosedur perkreditan yang rumit yang mengharuskan debitur untuk memberikan jaminan. Padahal para pedagang kecil lemah pada umumnya tidak memiliki barang yang cukup berharga yang dapat dijadikan jaminan kredit. Ada juga pihak yang dapat memberikan kredit kepada mereka yaitu renternir. Renternir memberikan kredit tanpa jaminan dan prosesnya cepat dan tanpa menggunakan prosedur yang rumit. Sehingga para pedagang terasa lebih mudah dalam memperoleh kredit, tetapi kenyataannya renternir bukanya membantu para pedagang dalam mempermudah pinjaman kredit, Namun tanpa mereka sadari justru pengembalian beserta bunganya sangat tinggi. Untuk itu pemerintah harus campur tangan membantu mereka dalam memecahkan masalah tersebut.

Sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri No. 414.2/842/PMD tahun 2002 perihal Program Pemberdayaan Masyarakat dengan Transparansi dan Akuntabilitas politik, pemerintah membentuk Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang berupaya menanggulangi kemiskinan yang salah satunya membantu permodalan bagi pengusaha dan pedagang kecil yang kesulitan dalam modal. Tetapi pelaksanaan Program Pengembangan Kecamatan menuai berbagai kritik antara lain, tidak mengikuti mekanisme dan prosedur, tetapi menciptakan mekanisme sendiri, Partisipasi maupun pelebagaan masyarakat cenderung mobilisasi, Keterlibatan pemerintah daerah masih kurang, Ketergantungan terhadap bantuan teknis dari konsultan masih besar, keterpaduan antar program masih lemah baik dari segi kegiatan, dana, waktu dan pengelolaan.

Tahun 2007 pemerintah Indonesia mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang telah diluncurkan oleh Presiden RI pada 30 April 2007 di Palu Sulawesi Tengah. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Mandiri Perkotaan, serta PNPM Mandiri wilayah khusus dan desa tertinggal. PNPM Mandiri Perdesaan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. Pendekatan PNPM Mandiri Perdesaan merupakan pengembangan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), yang selama ini dinilai berhasil.

Kehadiran PNPM Mandiri Perdesaan di tengah masyarakat diharapkan dapat membantu para pedagang kecil dalam memperoleh bantuan kredit dengan prosedur yang mudah, persyaratan yang mudah dan bunga yang terjangkau. sehingga dapat memperluas dan meningkatkan usahanya agar pendapatnya dapat meningkat. Tujuan utama dari PNPM Mandiri Perdesaan adalah untuk meningkatnya kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan sehingga dapat mencapai pertumbuhan penduduk yang tinggi dan SDM yang berkualitas.

PNPM Mandiri Perdesaan mendorong keterlibatan perempuan (Gender) dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pelestarian pembangunan. PNPM Mandiri Perdesaan dilaksanakan dengan membangun kemitraan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah melalui sinergi penyediaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM), yang berguna bagi perluasan kesempatan kerja dan tambahan pendapatan bagi tenaga kerja perdesaan serta peningkatan partisipasi perempuan dan kelompok miskin perdesaan.

Adanya PNPM Mandiri Perdesaan di lingkup kecamatan khususnya di Kecamatan Kaliwungu diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat khususnya para pedagang kecil dalam mengatasi lemahnya permodalan yang disebabkan tidak semata-mata karena kekurangan uang akan tetapi juga kekurangmampuan dalam mengelola uang yang mereka miliki. dan upaya peningkatan pendapatan sehingga dapat melepaskan diri dari kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi serta dapat menambah kesempatan kerja bagi masyarakat. Pemerintah ingin agar masyarakat golongan ini mampu meningkatkan taraf hidup sehingga akan meningkatkan pendapatan perkapita negara yang akan dapat memajukan negara.

Kecamatan Kaliwungu melaksanakan program PNPM Mandiri Perdesaan di 11 desa. Berdasarkan hasil pengamatan, pedagang kecil setelah mendapat bantuan kredit mengalami kondisi yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya keadaan dan kebutuhan pedagang itu sendiri. Ada pedagang yang benar-benar menggunakan bantuan kredit tersebut untuk modal berdagang sehingga usahanya mengalami peningkatan. Tetapi ada pula pedagang kecil yang hanya menggunakan sebagian kreditnya untuk modal usaha dan selebihnya untuk menutup kebutuhan sehari-hari. Para pedagang tersebut sering kali mengalami kerancuan keuangan. Uang yang dimiliki seharusnya digunakan untuk modal usaha tetapi mereka menggunakan uang tersebut untuk kepentingan di luar usaha. Sehingga sebenarnya lemahnya modal pedagang golongan ekonomi lemah tidak semata-mata karena kekurangan uang, akan tetapi juga kurangnya pengetahuan dan kemampuan mengelola uang yang dimiliki.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan Kecamatan Kaliwungu diharapkan dapat menjadi mitra dan sahabat bagi para pedagang kecil di Kecamatan Kaliwungu dan dapat memberikan kemudahan bagi para pedagang kecil untuk mendapatkan bantuan modal dalam bentuk kredit. Dengan segala kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh PNPM Mandiri Perdesaan, banyak pedagang yang memanfaatkan fasilitas yang ada untuk memperoleh bantuan modal untuk mengembangkan usahanya dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan hidup.

Berdasarkan latar belakang yang ada diatas, maka penulis akan mengadakan penelitian dengan judul **“IMPLEMENTASI PEMBERIAN KREDIT PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (PNPM) DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN PEDAGANG KECIL DI KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2009”**

B. Perumusan Masalah

Adanya perumusan masalah yang jelas diperlukan agar dapat memberikan jalan yang mudah di dalam pemecahan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dibuat perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang tahun 2010 ?
2. Bagaimana pendapatan pedagang kecil setelah mendapat bantuan kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan?
3. Apakah hambatan yang dihadapi pedagang kecil dalam proses pemberian kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan dan upaya yang dilakukan pedagang kecil untuk mengatasi hambatan tersebut?
4. Apakah hambatan yang dihadapi PNPM Mandiri Perdesaan dalam proses pemberian kredit kepada pedagang kecil dan upaya yang dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan untuk mengatasi hambatan tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan bertujuan :

1. Untuk mengetahui prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana pendapatan pedagang kecil setelah mendapat bantuan kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pedagang kecil dalam proses pemberian kredit PNPM dan upaya yang dilakukan pedagang kecil untuk mengatasi hambatan tersebut.
4. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi PNPM Mandiri Perdesaan dalam proses pemberian kredit ke pedagang kecil dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Melalui suatu penelitian ini diharapkan akan mampu menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. sehingga dalam penelitian ini penulis harapkan mampu memberikan manfaat sebagai berikut:

1 Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian ini sebagai sarana untuk memperdalam mata kuliah yang diterima di bangku kuliah.
- b. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang permasalahan yang diteliti.

2 Manfaat Praktis

- a. Memberikan informasi kredit bagi masyarakat khususnya para pedagang kecil mengenai kredit PNPM Mandiri Perdesaan.
- b. Memberi informasi kepada pengurus PNPM Mandiri Perdesaan mengenai pendapatan pedagang kecil setelah mendapat kredit.
- c. Memberikan masukan pedagang kecil akan pentingnya memanfaatkan kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam rangka meningkatkan pendapatan yang berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan

Istilah pemberdayaan merupakan penerjemahan dari istilah *empowerment* yang berawal dari kata daya (*power*). Daya dalam arti kekuatan yang berasal dari dalam tetapi dapat diperkuat dengan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Istilah ini muncul karena keprihatinan dari efek negatif dari pertumbuhan ekonomi. Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan khususnya pembangunan ekonomi. Keterbelakangan dan kemiskinan yang muncul dalam proses pembangunan disebabkan oleh kualitas Sumber Daya Manusia yang masih rendah.

Pembangunan yang berhasil, diperlukan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan memiliki potensi tinggi dalam pembangunan Indonesia. Upaya untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia sekarang lebih dikenal dengan pemberdayaan. Dalam (<http://www.binaswadaya.org/files/pemberdayaan-masyarakat-desa.pdf> diakses pada tanggal 9 juni 2010) pemberdayaan yaitu memberdayakan orang yang berarti mendorong mereka menjadi lebih terlibat dalam keputusan dan aktifitas yang mempengaruhi pekerjaan mereka. Pemberdayaan tersebut mempunyai tujuan dua arah. Pertama, melepaskan belenggu kemiskinan, dan keterbelakangan. Kedua, memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur ekonomi dan kekuasaan

b. Pengertian Ekonomi

Perekonomian suatu negara sangat menentukan nasib rakyatnya. Perekonomian yang buruk dan tidak stabil mengakibatkan ekonomi masyarakat menurun sehingga masyarakat hidup dalam kesusahan dan kemiskinan. Tetapi jika perekonomian stabil dan membaik maka ekonomi masyarakatpun akan meningkat, hidup serba kecukupan dan kesejahteraanpun semakin dirasakan. Setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia, perekonomian Indonesia

sekarang mulai bangkit. Beberapa usaha dilakukan untuk memotivasi dan mendorong kegiatan ekonomi agar perekonomian semakin membaik. Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia (2005: 287):

Ekonomi adalah ilmu yang mengenai asas-asas produksi, distribusi, dan pemakaian barang-barang serta kekayaan (hak keuangan, perindustrian, dan perdagangan); pemanfaatan uang, tenaga, waktu, dsb yang berharga; tata kehidupan perekonomian (suatu negara); tata urusan keuangan rumah tangga(organisasi, negara)

Pengertian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi adalah suatu kegiatan produksi, distribusi dan konsumsi dalam pemanfaatan faktor-faktor produksi yang berupa tenaga, uang, dan waktu untuk memenuhi kebutuhan keuangan dalam suatu rumah tangga maupun negara.

c. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan kemampuan kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan yang mereka miliki. Adapun pemberdayaan masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkait, yaitu masyarakat sebagai pihak yang diberdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Tim Pengendali (TP) PNPM Mandiri (2007: 20) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraannya. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan yang lebih besar dari perangkat pemerintah daerah serta berbagai

pihak untuk memberikan kesempatan dan menjamin keberlanjutan berbagai hasil yang dicapai.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk membangun potensi itu sendiri, dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki oleh masyarakat miskin serta berupaya untuk mengembangkannya. Dimana sasaran utama dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat tentunya adalah peningkatan produktifitas masyarakat miskin pedesaan untuk meningkatkan pendapatan dan mendapatkan peluang dan kesempatan mereka memperoleh pekerjaan yang lebih baik sehingga ekonomi masyarakat miskin dapat ditingkatkan.

2. Tinjauan Tentang Kredit

a. Pengertian Kredit

Istilah kredit bukan hal yang asing bagi masyarakat. Sebab seringkali dijumpai ada anggota masyarakat yang jual beli barang secara kredit. Jual beli tersebut tidak dilakukan secara tunai (kontan), tetapi dengan cara mengangsur. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan hutang, karena setelah jangka waktu tertentu mereka harus membayar lunas. Kredit dapat pula diartikan bahwa pihak kesatu memberikan pinjaman baik berupa barang, uang atau jasa kepada pihak lain sedangkan balas jasa akan diterima kemudian.

Sebenarnya kata kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “credere” yang artinya “percaya”. Bila dihubungkan dengan lembaga keuangan pemberi kredit, maka terkandung pengertian bahwa lembaga keuangan pemberi kredit selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah selaku debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan.

Raymond P. Kent mengatakan dalam bukunya Thomas Suyatno et al (1993: 12) mengatakan bahwa “Kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu yang diminta atau pada waktu yang akan datang, karena penyerahan pada masa sekarang”. Lebih lanjut

dalam UU No 10 tahun 1998 tentang Pokok-pokok Perbankan, yang dikutip Kasmir (2002: 73), mengartikan kredit sebagai berikut:

Kredit adalah penyedia uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan kredit itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pemabgian hasil keuntungan.

Definisi lain tentang kredit menurut Veithzal Rifai & Adrian Permata (2006: 4) mengatakan bahwa “kredit adalah penyerahan barang, jasa atau uang dari satu pihak (kreditur/atau pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang/*borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak”.

Secara umum kredit adalah pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur untuk meningkatkan usahanya, untuk mencapai keuntungan yang dicita-citakan. Dalam prakteknya pemberian kredit adalah pemberian pinjaman oleh kreditur kepada debitur untuk membiayai kegiatan usahanya, dalam jumlah tertentu, dalam jangka waktu yang disepakati bersama dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui bersama yang dituangkan dalam suatu perjanjian kredit yang berisi antara lain kesediaan debitur untuk membayar kembali termasuk beban bunga yang harus dibayar.

b. Unsur-unsur Kredit

Diatas telah diungkapkan bahwa kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Ini berarti bahwa prestasi atau imbalan yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Unsur-unsur dalam kredit menurut Thomas Suyatno et al (2003: 14) adalah sebagai berikut:

1) Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi kredit bahwa yang diberikannya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang.

2) Waktu

Suatu masa yang akan memisahkan antara pemberian prestasi/pinjaman dengan kontra prestasi yang akan diterimanya pada masa yang akan datang.

3) Tingkat risiko atau *Degree of risk*

Merupakan suatu tingkat risiko yang dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh kemampuan manusia untuk menerobos hari depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidaktentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian prestasi.

4) Prestasi

Prestasi yang diberikan dapat berupa barang, jasa, atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern ini maka yang dimaksudkan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

c. Tujuan dan Fungsi Kredit

Tujuan kredit didasarkan kepada usaha untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan prinsip ekonomi yang berarti pengorbanan yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh manfaat (keuntungan) yang sebesar-besarnya. Dari faktor kemampuan dan kemauan tersebut, terdapat unsur keamanan (*safety*) dan sekaligus unsur keuntungan (*profitability*) dari suatu unsur kredit yang saling berkaitan Tujuan kredit menurut Veithzal Rifai & Adrian Permata (2006: 9-10) adalah sebagai berikut:

1) Keamanan atau *Safety*

Bahwa prestasi yang akan diberikan dalam bentuk uang, barang, atau jasa betul-betul terjamin pengembaliannya, sehingga keuntungan yang diharapkan dapat menjadi kenyataan.

2) Keuntungan atau *Safety*

Keuntungan merupakan tujuan dari pemberian kredit yang diwujudkan dalam bentuk bunga yang diterima.

Sedangkan tujuan kredit yang dikemukakan oleh Kasmir (2002: 105) adalah sebagai berikut :

1) Mencari keuntungan

Hasil keuntungan ini diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima oleh kreditur sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan oleh nasabah.

2) Membantu usaha nasabah

Bantuan ini berupa dana, baik dana untuk investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut, maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3) Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor riil.

Tujuan dari kredit yang diberikan oleh suatu bank, khususnya bank pemerintah yang akan mengembangkan tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:

- 1) Turut menyukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.
- 2) Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna memenuhi kebutuhan masyarakat.
- 3) Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya. (Thomas suyatno et al, 2003: 15)

Kredit mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian, perdagangan, dan keuangan menurut Veithzal Rifai & Adrian Permata (2006: 10) adalah sebagai berikut:

1) Kredit dapat meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, deposito atau tabungan. Uang tersebut dalam presentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas. Para pengusaha menikmati kredit dari bank untuk memperluas usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui kredit terdapat suatu usaha meningkatkan produktivitas secara menyeluruh. Dengan demikian dana yang mengendap di bank tidaklah diam, tetapi disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun kemanfaatannya bagi masyarakat.

Para pedagang kecil menikmati kredit PNPM untuk memperluas usahanya, baik untuk peningkatan produksi, perdagangan maupun untuk memulai usaha baru. Pada dasarnya melalui kredit PNPM pedagang dapat meningkatkan usahanya guna memperoleh peningkatan pendapatan,

2) Kredit dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang

Kredit yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan pembayaran baru, seperti: cek, giro, bilyet dan wesel. Apabila pembayaran dilakukan dengan cek, giro, bilyet dan wesel, maka akan dapat meningkatkan peredaran uang giro. Disamping itu kredit perbankan yang dibentuk secara tunai dapat pula meningkatkan peredaran uang kartal sehingga arus lalu lintas akan berkembang pula.

Pinjaman kredit dari PNPM berupa Bantuan Langsung Masyarakat yang langsung diberikan kepada para pedagang kecil di Kecamatan Kaliwungu. Dengan beredarnya uang tunai tersebut kepada para pedagang kecil tentunya dapat meningkatkan peredaran lalu lintas uang.

3) Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi

Kondisi ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilitas pada dasarnya diarahkan kepada usaha-usaha antara lain:

- a) Pengendalian inflasi
- b) Peningkatan ekspor
- c) Rehabilitasi prasarana
- d) Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat

Usaha pengendalian arus inflasi terlebih lagi untuk usaha pembangunan ekonomi maka kredit bank memegang peranan yang sangat penting. Kredit harus diarahkan pada sektor-sektor yang produktif dan sektor-sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat. Hal itu bertujuan untuk meningkatkan produksi dan memenuhi kebutuhan dalam negeri agar bisa diekspor.

Kredit PNPM diprioritaskan bagi Rumah Tangga Miskin(RTM) yang mempunyai usaha produktif. Kredit PNPM Mandiri Perdesaan diharapkan dapat membantu mereka dalam meningkatkan pendapatan sehingga akan berpengaruh pada kehidupan perekonomiannya.

4) Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha

Setiap orang yang berusaha selalu ingin meningkatkan usahanya tersebut namun adakalanya dibatasi oleh kemampuan di bidang permodalan. Bantuan kredit yang diberikan oleh bank akan dapat mengatasi kekurangmampuan di bidang permodalan, sehingga para pengusaha akan dapat meningkatkan usahanya.

Permasalahan yang dialami oleh para pedagang kecil di Kecamatan Kaliwungu kebanyakan karena kekurangan modal. PNPM Mandiri Perdesaan menawarkan kredit dengan prosedur yang mudah, bunga rendah serta tidak adanya jaminan berupa barang-barang, sehingga para pedagang memanfaatkan pinjaman tersebut untuk menambah modal. Dengan tambahan modal yang dimiliki, para pedagang akan lebih bergairah dalam meningkatkan usahanya.

5) Kredit dapat meningkatkan pemerataan pendapatan

Bantuan kredit dari bank, diharapkan para pengusaha dapat memperluas usahanya dan mendirikan proyek-proyek baru. Peningkatan usaha dan pendirian proyek baru akan membutuhkan tenaga kerja untuk melaksanakan proyek-proyek tersebut. Dengan demikian mereka akan memperoleh

pendapatan. Apabila perluasan usaha serta pendirian proyek-proyek baru telah selesai maka pemerataan pendapatan akan meningkat pula.

Bantuan kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan, diharapkan para pedagang kecil dapat mendirikan usaha baru atau meningkatkan usaha yang telah ada. Sehingga terciptalah lapangan kerja baru yang dapat menampung tenaga kerja dan mengurangi pengangguran. Ini akan memberikan pendapatan bagi masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan para tenaga kerja baru.

d. Jenis-jenis Kredit

Beragam jenis usaha, menyebabkan beragam pula kebutuhan akan dana. Kebutuhan dana yang beragam menyebabkan jenis kredit juga menjadi beragam. Jenis-jenis kredit yang diberikan oleh perbankan kepada masyarakat dapat dilihat dari berbagai sudut, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Suyatno et al (2003) adalah sebagai berikut :

1) Berdasarkan sudut tujuannya

a) Kredit Konsumtif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya proses konsumsi masyarakat. Dana kredit konsumtif tidak digunakan untuk kepentingan usaha.

b) Kredit Produktif

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk memperlancar proses produksi. Misalnya, dana kredit digunakan untuk menutup biaya proses pengolahan bahan baku menjadi barang konsumsi.

2) Berdasarkan keperluan kredit

a) Kredit Produksi

Yaitu kredit yang diberikan untuk membiayai current operation suatu perusahaan.

b) Kredit Perusahaan

Yaitu kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membeli barang-barang untuk dijual lagi.

c) Kredit investasi

Yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan modal investasi atau untuk pembelian barang modal.

3) Berdasarkan jangka waktu

a) Kredit jangka pendek

Kredit dengan jangka waktu pelunasan antara 1 – 3 tahun

b) Kredit jangka menengah

Kredit dengan jangka waktu pelunasan 3 – 5 tahun

c) Kredit jangka panjang

Kredit dengan jangka pelunasan lebih dari 5 tahun

4) Berdasarkan jaminan kredit

a) Kredit tanpa jaminan atau *Unsecured loans*

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan. Di Indonesia kredit ini tidak lazim dipakai terutama bagi perusahaan besar dan kuat. Dalam kredit *unsecured loans*, jaminan kredit yang dimaksud bukanlah jaminan fisik melainkan jaminan bonafiditas dan prospek usaha debitur.

b) Kredit dengan jaminan atau *Secured loans*

Jenis kredit *secured loans* adalah kredit yang menggunakan jaminan. Jenis kredit inilah yang lazim digunakan di Indonesia sesuai dengan larangan bank Indonesia tentang pemberian kredit tanpa jaminan.

e. Prinsip-prinsip Pemberian Kredit

Proses pemberian kredit pada prinsipnya pihak kreditur, khususnya bank perlu keyakinan akan kemampuan debitur untuk mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai waktu yang telah disepakati. Untuk itu pihak bank akan melakukan penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan debitur untuk menjalankan kewajibannya. Hal tersebut dilakukan oleh seorang analis kredit.

Adapun tujuan dari evaluasi adalah untuk:

- 1) Menjamin bahwa kredit dapat dilunasi tepat waktu
- 2) Meyakinkan bahwa persyaratan kredit sudah dipenuhi
- 3) Mengeliminasi risiko kredit macet

Dunia perbankan memiliki 6 faktor internal dan eksternal perusahaan yang sering disebut 6C yang dapat dijadikan fokus bagi seorang analis kredit dalam melakukan tugasnya. Faktor-faktor tersebut menurut Thomas Suyatno et al (2003) adalah:

1) Watak atau *character*

Watak adalah keadaan sifat dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian watak sangat berguna untuk mengetahui sampai sejauh mana iktikad/kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan. Menurut Ruddy Tri Santoso (1996: 207) *character* adalah tanggung jawab moral calon debitur dalam upaya membayar kembali jumlah pokok pinjamannya. Kemauan identik dengan aspek psikologis moral nasabah dan itikad baik nasabah serta komitmennya untuk pengakuan hutang berikut upaya pelunasannya.

2) Kemampuan/ Kapasitas atau *capacity*

Kapasitas adalah jumlah dana /modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah.. Penilaian ini bermanfaat untuk mengetahui/mengukur sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan hutangnya secara tepat waktu.

3) Modal atau *capital*

Modal adalah harta perusahaan. Jadi analisis kredit akan menilai kondisi modal atau perusahaan yang digunakan untuk kegiatan operasi perusahaan. Menurut Ruddy Tri Santosa (1996: 206) *capital* adalah modal yang dipergunakan dalam menjalankan usaha. Modal berarti kemampuan nasabah secara nyata, memiliki unit pengukur (yaitu uang) dan berwujud.

4) Jaminan atau *collateral*

Jaminan adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh

mana risiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Sedangkan menurut Ruddy Tri Santosa (1996: 207) yang dimaksud dengan *collateral* adalah jaminan dalam bentuk barang bergerak atau tidak bergerak yang digunakan untuk jaminan kredit,

5) Kondisi ekonomi / *Condition of economy*

Kondisi ekonomi adalah situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya mempengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur.

6) Batasan atau *constraint*

Batasan merupakan permasalahan geografis dan sosial di tempat dimana seorang pengusaha mendirikan usahanya. Terkadang seorang pengusaha tidak dapat meneruskan usahanya di suatu tempat tertentu karena adanya norma dan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis yang dapat menjadi kendala bagi perusahaan.

f. Prosedur Umum Kredit

Usaha untuk memperoleh suatu kredit, seorang nasabah (debitur) harus melalui prosedur perkreditan, begitu juga bagi kredur harus melalui prosedur-prosedur tertentu untuk dapat memberikan kredit kredit. Menurut Thomas Suyatno et al (2003: 69-87) menyatakan bahwa prosedur pemberian kredit meliputi tahap-tahap sebagai berikut :

1) Permohonan kredit

Permohonan kredit meliputi:

- a) Permohonan baru untuk mendapatkan suatu jenis fasilitas kredit
- b) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan
- c) Permohonan perpanjangan/ pembaharuan masa laku kredit yang telah berakhir jangka waktunya.
- d) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan syarat-syarat fasilitas kredit yang sedang berjalan, antara lain penukaran jaminan, perubahan/ pengunduran jadwal angsuran.

Untuk mengajukan permohonan kredit diperlukan berkas-berkas yang terdiri dari surat permohonan yang ditandatangani oleh nasabah secara lengkap dan sah. Daftar isian yang disediakan oleh bank yang secara sebenarnya dan lengkap diisi oleh nasabah serta daftar lampiran lainnya yang diperlukan menurut jenis fasilitas kredit. Setelah surat atau berkas permohonan yang sudah diterima bank, harus dicatat dalam register khusus yang telah disediakan.

2) Penyidikan dan Analisis Kredit

Penyidikan dapat dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemohon kredit atau debitur, kemudian mengumpulkan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah, baik data intern maupun data ekstern. Penyidik juga harus memeriksa kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang dikemukakan debitur dan informasi lainnya. Setelah selesai melakukan penyidikan, penyidik harus membuat laporan hasil penyelidikan.

3) Penolakan Atas Permohonan Kredit

Dalam pengajuan sebuah permohonan kredit oleh calon nasabah kepada bank, ada kemungkinan ditolak. Penolakan permohonan kredit dilakukan oleh bagian kredit dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang. Penolakan permohonan kredit dapat dilakukan apabila permohonan kredit dianggap tidak memenuhi syarat. Surat penolakan harus disampaikan secara tertulis kepada pemohon kredit dan harus disertai alasan serta dibuat minimal rangkap tiga.

4) Persetujuan Permohonan Kredit

Apabila pemohon kredit telah mampu memenuhi persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh kreditur (bank), maka kreditur dapat memberikan persetujuan permohonan kredit.

5) Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank atau lembaga keuangan lain yang memberikan kredit. Dalam prakteknya, pencairan kredit berupa pembayaran dan atau pemindahbukuan atas beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya.

Dalam melakukan pencairan kredit apabila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dipenuhi.

6) Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban hutang nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit.

3. Tinjauan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan.

a. Pengertian PNPM Mandiri Perdesaan

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan campur tangan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun, penanganannya selama ini tidak berkelanjutan. Peran usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Untuk itu diperlukan perubahan yang terarah dan menyeluruh dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan. (Tim Pengendali (TP) PNPM, 2007: 19)

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Program ini dilakukan untuk lebih mendorong upaya peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat di perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan ini menjadi bagian tak terpisahkan dari PNPM Mandiri dan telah dilakukan sejak tahun 1998 melalui Program Pengembangan Kecamatan (PPK).

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan berada di bawah pembinaan Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), Departemen Dalam Negeri. Program ini didukung dengan pembiayaan yang berasal dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), alokasi Anggaran Pendapatan

dan Belanja Daerah (APBD), dana hibah dari sejumlah lembaga pemberi bantuan, serta swadaya masyarakat.

b. Visi dan Misi PNPM Mandiri Perdesaan

Adapun visi dan misi PNPM Mandiri Perdesaan menurut (Tim Koordinasi PNPM MD, 2007: 2) adalah sebagai berikut:

- 1) Visi PNPM Mandiri Perdesaan adalah tercapainya kesejahteraan dan kemandirian masyarakat miskin perdesaan. Kesejahteraan berarti terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat. Kemandirian berarti mampu mengorganisir diri untuk memobilisasi sumber daya yang ada di lingkungannya, mampu mengakses sumber daya di lingkungannya serta mengelola sumber daya tersebut untuk mengatasi masalah kemiskinan.
- 2) Misi PNPM Mandiri Perdesaan adalah peningkatan kapasitas masyarakat dan kelembagaannya, pelebagaan sistem pembangunan partisipatif, pengefektifan fungsi dan peran pemerintahan lokal, peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi masyarakat, pengembangan jaringan kemitraan dalam pembangunan.

c. Tujuan PNPM Mandiri Perdesaan

Adapun tujuan PNPM Mandiri Perdesaan (Tim Koordinasi PNPM MD, 2007: 2-3) adalah sebagai berikut:

- 1) Tujuan Umum PNPM Mandiri Perdesaan adalah meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin di perdesaan dengan mendorong kemandirian dan pengambilan keputusan dan pengelolaan pembangunan.
- 2) Tujuan Khusus meliputi :
 - a) Meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan atau kelompok perempuan, dalam pengambilan keputusan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan pelestarian pembangunan.
 - b) Melembagakan pengelolaan pembangunan ekonomi secara partisipatif dengan mendayagunakan semua sumber daya yang ada.

- c) Mengembangkan kapasitas pemerintah lokal dalam memfasilitasi pengelolaan pembangunan partisipatif.
- d) Menyediakan prasarana sarana sosial dasar dan ekonomi yang diprioritaskan oleh masyarakat.
- e) Melembagakan pengelolaan dana bergulir.
- f) Mendorong terbentuk dan berkembangnya badan Kerja Sama antar Desa.
- g) Mengembangkan kerja sama antar pemangku kepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan perdesaan.

d. Prinsip – prinsip dasar PNPM Mandiri Perdesaan

Adapun prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan (Tim Pengendali (TP) PNPM MD, 2007: 23-24) Meliputi :

- 1) Bertumpu pada pembangunan manusia.
Pelaksanaan PNPM Mandiri senantiasa bertumpu pada peningkatan harkat dan martabat manusia seutuhnya.
- 2) Otonomi
Dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, masyarakat memiliki kewenangan secara mandiri untuk berpartisipasi dalam menentukan dan mengelola kegiatan pembangunan.
- 3) Desentralisasi
Kewenangan pengelolaan kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan dilimpahkan kepada pemerintah daerah atau masyarakat sesuai dengan kapasitasnya.
- 4) Berorientasi pada masyarakat miskin
Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kepentingan dan kebutuhan masyarakat miskin dan kelompok masyarakat yang kurang beruntung.
- 5) Partisipasi
Masyarakat terlibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan.
- 6) Keadilan gender
Laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap

tahap pembangunan dan dalam menikmati secara adil manfaat kegiatan pembangunan.

7) Demokratis.

Setiap pengambilan keputusan pembangunan dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.

8) Transparansi dan Akuntabel.

Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.

9) Prioritas

Pemerintah dan masyarakat harus memprioritaskan pemenuhan kebutuhan untuk pengentasan kemiskinan dengan mendayagunakan secara optimal berbagai sumberdaya yang terbatas.

10) Kolaborasi

Semua pihak yang berkepentingan dalam penanggulangan kemiskinan didorong untuk mewujudkan kerjasama dan sinergi antar pemangku kepentingan dalam penanggulangan kemiskinan.

11) Keberlanjutan

Setiap pengambilan keputusan harus mempertimbangkan kepentingan peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak hanya saat ini tapi juga di masa depan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

12) Sederhana

Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

e. Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan

Sasaran PNPM Mandiri Perdesaan (Tim Koordinasi PNPM MD, 2007: 4) adalah sebagai berikut:

1) Lokasi sasaran

Lokasi sasaran PNPM Mandiri Perdesaan meliputi seluruh kecamatan perdesaan di Indonesia yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, dan tidak termasuk Kecamatan – kecamatan yang tidak termasuk katagori “ Kecamatan bermasalah dalam PPK “

2) Kelompok sasaran

- a) Rumah tangga Miskin (RTM) di perdesaan.
- b) Kelembagaan masyarakat di perdesaan
- c) Kelembagaan pemerintah local

f. Pendanaan

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program Pemerintah Pusat bersama Pemerintah Daerah, artinya program ini direncanakan, dilaksanakan dan didanai bersama-sama berdasarkan persetujuan dan kemampuan yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat dan Daerah (Tim Koordinasi PNPM MP, 2007: 5):

1) Sumber dan ketentuan alokasi dana BLM PNPM Mandiri Perdesaan

Sumber dana berasal dari:

- a) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
- c) Swadaya masyarakat
- d) Partisipasi dunia usaha

2) Kriteria alokasi

Alokasi dana BLM per kecamatan ditetapkan oleh Pemerintah dengan mempertimbangkan jumlah dan distribusi penduduk serta jumlah orang miskin.

3) Dana operasional UPK dan pelaksanaan di Desa

Kebutuhan biaya operasional kegiatan TPK/desa dan UPK bertumpu pada swadaya masyarakat. Namun untuk menumbuhkan keswadayaan tersebut diberikan bantuan stimulan dana dari PNPM Mandiri Perdesaan. Dana operasional UPK sebesar maksimal dua persen (2%) dari dana bantuan PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan di Kecamatan tersebut. Dana operasional TPK/desa maksimal tiga persen (3%) dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang dialokasikan sesuai hasil Musyawarah Antar Desa Penetapan Kegiatan menurut Surat Penetapan Camat (SPC) untuk desa yang bersangkutan.

g. Alur Kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan

Alur kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan meliputi beberapa tahap (TK PNPM MD, 2007: 18)

1) Tahap perencanaan Kegiatan

Perencanaan kegiatan meliputi tahap persiapan dan sosialisasi awal, serta perencanaan di desa, kecamatan dan kabupaten. Tahap persiapan dan sosialisasi awal dimulai dari musyawarah antar desa (MAD) sosialisasi sampai dengan pelatihan KPMD/K. Perencanaan kegiatan di desa, dimulai dengan tahap penggalian gagasan sampai dengan musdes perencanaan. Perencanaan di Kecamatan dimulai dengan Musyawarah Antar Desa (MAD) mengenai usulan sampai dengan MAD penetapan usulan. Perencanaan di Kabupaten adalah perencanaan koordinatif, dimulai dari delegasi kecamatan dalam forum SKPD sampai dengan musrenbag kabupaten.

2) Tahap pelaksanaan

Dalam menjamin kualitas pelaksanaan kegiatan yang tetap mengacu pada mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan, maka perlu adanya persiapan pelaksanaan yang matang dan terencana. Persiapan pelaksanaan ini lebih ditujukan kepada penyiapan aspek sumber daya manusia yaitu masyarakat, TPK, UPK, dan seluruh pelaku PNPM Mandiri Perdesaan lainnya. Karena itu,

TPK dan UPK perlu mendapat pelatihan terlebih dahulu sebelum melaksanakan kegiatan yang didanai PNPM Mandiri Perdesaan.

3) Tahap pelestarian kegiatan

Pelestarian kegiatan PNPM yang dimaksud adalah pengelolaan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan harus dijamin dapat memberi manfaat kepada masyarakat secara berkelanjutan, serta memiliki aspek pemberdayaan dan prinsip-prinsip PNPM Mandiri Perdesaan harus memberi dampak perubahan positif secara berkelanjutan bagi masyarakat. Untuk mencapai hal tersebut semua pelaku PNPM Mandiri Perdesaan harus mengetahui dan mampu memahami latar belakang, dasar pemikiran, prinsip, prosedur dan mekanisme PNPM Mandiri Perdesaan.

h. Jenis Kegiatan yang didanai PNPM-MP

Usulan kegiatan yang dapat didanai dalam PNPM Mandiri Perdesaan menurut Petunjuk Teknis Operasional (PTO) Penjelasan (2008: 1) meliputi:

- 1) kegiatan pembangunan atau perbaikan prasarana sarana dasar yang dapat memberikan manfaat jangka pendek maupun jangka panjang secara ekonomi bagi masyarakat miskin atau Rumah tangga miskin(RTM)
- 2) peningkatan bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan termasuk kegiatan pelatihan pengembangan ketrampilan masyarakat,
- 3) Kegiatan peningkatan kapasitas/ketrampilan kelompok usaha ekonomi produktif (UEP) terutama bagi kelompok usaha yang berkaitan dengan produksi berbasis sumber daya lokal.
- 4) Penambahan permodalan Simpan Pinjam untuk kelompok Perempuan (SPP)

Usaha yang dilakukan oleh pedagang kecil termasuk dalam kategori bantuan kredit untuk Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Kegiatan Simpan Pinjam untuk Kelompok Perempuan (SPP) merupakan kegiatan pemberian permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam (PTO Penjelasan, 2008: 58). Dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang disediakan untuk mendanai kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP)

per kecamatan maksimal 25 % dari alokasi BLM. Untuk Membentuk Kelompok SPP, harus memenuhi beberapa ketentuan (PTO Penjelasan, 2008: 59) antara lain :

- 1) Kelompok yang dikelola dan anggotanya perempuan, yang satu sama saling mengenal, memiliki kegiatan tertentu dan pertemuan rutin yang sudah berjalan sekurang-kurangnya satu tahun.
- 2) Mempunyai kegiatan simpan pinjam dengan aturan pengelolaan dana simpanan dan dana pinjaman yang telah disepakati.
- 3) Telah mempunyai modal dan simpanan dari anggota sebagai sumber dana pinjaman yang diberikan kepada anggota.
- 4) Kegiatan pinjaman pada kelompok masih berlangsung dengan baik.
- 5) Mempunyai organisasi kelompok dan administrasi secara sederhana.

Mekanisme pengelolaan dalam kegiatan Simpan Pinjam Kelompok Perempuan (SPP) menurut PTO Penjelasan (2008: 59-64) adalah sebagai berikut :

- 1) MAD Sosialisasi

Dalam MAD Sosialisasi dilakukan sosialisasi ketentuan dan persyaratan untuk kegiatan SPP sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP.

- 2) Musdes Sosialisasi

Dalam Musdes Sosialisasi dilakukan sosialisasi Ketentuan dan Persyaratan untuk kegiatan SPP di tingkat desa sehingga pelaku-pelaku tingkat desa memahami adanya kegiatan SPP dan melakukan persiapan proses lanjutan.

- 3) Musyawarah Dusun

Proses identifikasi kelompok melalui musyawarah di dusun/kampung dengan proses sebagai berikut :

- a) Identifikasi kelompok termasuk kondisi anggota.
- b) Rumah tangga miskin yang belum menjadi anggota kelompok agar dilakukan tawaran dan fasilitasi untuk menjadi anggota kelompok sehingga dapat menjadi pemanfaat.
- c) Hasil musyawarah dusun dituangkan dalam berita acara dilampiri:
 - (1) Daftar kelompok yang diidentifikasi,

- (2) Kelompok SPP dengan daftar pemanfaat yang diusulkan,
 - (3) Peta sosial dan peta rumah tangga miskin,
 - (4) Rekap kebutuhan pemanfaat.
- 4) Musyawarah Desa dan Musyawarah Khusus Perempuan (MKP)
 - 5) Verifikasi

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam proses verifikasi kegiatan SPP adalah :

- a) Penetapan formulir verifikasi
- b) Proses pelaksanaan verifikasi

Verifikasi kelompok SPP mencakup beberapa hal sebagai berikut :

- (1) Pengalaman Kegiatan Simpan Pinjam
 - (2) Persyaratan Kelompok
 - (3) Kondisi Kegiatan Simpan Pinjam, dengan penilaian :
 - (a) Permodalan
 - (b) Kualitas Pinjaman
 - (c) Administrasi dan Pengelolaan
 - (d) Pendapatan
 - (4) Penilaian khusus rencana kegiatan.
 - (5) Jumlah rumah tangga miskin sebagai calon pemanfaat diverifikasi dengan daftar rumah tangga miskin
- 6) MAD Prioritas Usulan

Tahapan ini merupakan tahapan evaluasi akhir dengan model prioritas kebutuhan dengan mempertimbangkan hasil verifikasi. Prioritas penilaian ditekankan pada kelompok yang lebih mengutamakan calon pemanfaat kategori rumah tangga miskin.

- 7) MAD Penetapan Usulan

Tahapan ini merupakan keputusan pendanaan mencakup penentuan pendanaan usulan dengan menentukan kelompok-kelompok yang telah memenuhi syarat dapat didanai dengan dana BLM. Dalam MAD penetapan usulan ini, dimungkinkan adanya kelompok yang didanai sesuai dengan MAD Prioritas Usulan mengundurkan diri sehingga peringkat selanjutnya yang akan menerima, jika terjadi tidak sama jumlah kebutuhan pada kelompok terakhir

maka agar diputuskan melalui musyawarah. Bagi kecamatan yang telah mengelola dana bergulir maka pada MAD ini dapat juga dilakukan proses MAD Perguliran.

8) Penetapan Persyaratan

Penetapan persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian Pinjaman paling tidak mencakup hal-hal :

- a) Penentuan jasa pinjaman dengan ketentuan: Besar jasa pinjaman ditentukan berdasarkan bunga pasar untuk pinjaman pada lembaga keuangan pada wilayah masing-masing. Sistem perhitungan jasa pinjaman menurun atau tetap.
- b) Jangka waktu pinjaman sumber dana BLM maksimal 12 bulan.
- c) Jadwal angsuran dana BLM paling tidak diangsur 3 kali angsuran dalam 12 bulan dengan memperhatikan dengan siklus usaha baik pada tingkat pemanfaat maupun tingkat kelompok.
- d) Angsuran langsung dari kelompok ke UPK.

9) Pencairan Dan

Ketentuan pencairan dana BLM dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPB dengan bukti penyaluran KW2.
- b) Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.
- c) Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelah dikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan Bukti Kuitansi yang ditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai Pengelola Kegiatan. Tujuan kuitansi ini adalah kelompok telah menerima langsung dari UPK dan selanjutnya mengembalikan kepada UPK.
- d) Kelompok membuat Perjanjian Pinjaman dengan UPK sebagai lampiran kuitansi penerimaan dana.
- e) Kelompok menyerahkan kuitansi/tanda terima uang per pemanfaat kepada UPK.

10) Pelestarian dan Pengembangan Kegiatan

Pelestarian kegiatan SPP mengacu pada ketentuan pengelolaan dana bergulir dengan mempertimbangkan ketentuan akses BLM yang telah disepakati dalam MAD yang mencakup :

a) Pelestarian Kegiatan

Dasar-dasar dalam rangka mewujudkan pelestarian kegiatan adalah

- (1) Adanya dana kegiatan SPP yang produktif dan bertambah jumlahnya untuk penyediaan kebutuhan pendanaan masyarakat miskin.
- (2) Adanya pelestarian prinsip PNPM Mandiri - Perdesaan terutama keberpihakan kepada orang miskin dan transparansi.
- (3) Penguatan kelembagaan baik dalam aspek permodalan ataupun kelembagaan kelompok.
- (4) Pengembangan layanan kepada masyarakat
- (5) Pengembangan permodalan.

b) Pengembangan Kelompok

Pengembangan kelompok SPP diarahkan sebagai lembaga pengelola simpanan dan pinjaman yang profesional, akuntabel sehingga mampu menarik minat kerja sama lembaga lain sebagai lembaga penyalur dan pengelola pinjaman. Pengembangan kelembagaan kelompok SPP, secara badan hukum dapat menjadi Koperasi Simpan Pinjam. Fasilitasi pengembangan kelompok dapat didasarkan pada tingkat perkembangan kelompok maupun fungsi kelompok yang dijelaskan dalam Pengelolaan Dana Bergulir.

4. Tinjauan Tentang Pedagang Kecil

a. **Pengertian pedagang kecil**

Pedagang kecil yang biasa disebut dengan pengecer (Retailer). Buchari Alma (2000: 116) mendefinisikan Perdagangan Eceran “sebagai suatu kegiatan menjual barang dan jasa kepada konsumen akhir. Sedangkan pedagang eceran adalah orang-orang atau toko yang kerja utamanya mengecerkan barang ke konsumen terakhir”.

Lebih lanjut dalam Undang-Undang No 9 tahun 1995 seperti yang dikutip Suhardjono (2002: 33) yang dimaksud usaha kecil adalah kegiatan usaha yang mempunyai kriteria :

- 1) Kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
- 2) Memiliki hasil penjualan bersih paling banyak Rp 1.000.000.000.
- 3) Milik warga negara Indonesia.
- 4) Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan/ cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai/berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar.
- 5) Berbentuk usaha orang perorangan, badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Keanggotaan PNPM Mandiri Perdesaan yang disebut dengan pedagang kecil adalah masyarakat yang mempunyai usaha mikro. Usaha Mikro menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tahun 2003, yaitu “Usaha produktif milik keluarga atau perorangan Warga Negara Indonesia dan memiliki hasil penjualan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) per tahun. Usaha Mikro dapat mengajukan kredit kepada bank paling banyak Rp. 50.000.000,00”.

Jadi pedagang kecil adalah pengusaha kecil golongan ekonomi lemah yang mempunyai standar pendapatan ekonomi lebih rendah dibandingkan dengan standar pendapatan pedagang pada umumnya dalam lingkungan sekitarnya.

b. Ciri-ciri Usaha Mikro (Pedagang Kecil)

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 tahun 2003, ciri-ciri usaha mikro adalah :

- 1) Jenis barang/komoditi usahanya tidak selalu tetap, sewaktu-waktu dapat berganti.
- 2) Tempat usahanya tidak selalu menetap, sewaktu-waktu dapat pindah tempat.
- 3) Belum melakukan manajemen/catatan keuangan yang sederhana sekalipun, belum atau masih sangat sedikit yang dapat membuat neraca usahanya.
- 4) Sumber daya manusianya (pengusahanya) berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya sampai tingkat SD dan belum memiliki jiwa wirausaha atau tengkulak.

- 5) Pada umumnya tidak/belum mengenal perbankan tapi lebih mengenal renternir atau tengkulak dan tidak memiliki izin usaha.

c. Pengklasifikasi Pedagang

Pedagang dapat diklasifikasikan menjadi beberapa macam. Menurut Buchari Alma (2000: 117) pedagang digolongkan menjadi dua, yaitu :

1) Pedagang Besar

Pedagang besar adalah orang atau badan yang melakukan aktivitas marketing untuk menggerakkan barang-barang dari produsen ke pedagang eceran atau lembaga-lembaga marketing lainnya.

2) Pedagang kecil atau eceran adalah orang-orang atau toko yang perkerjaan utamanya mengecerkan barang kepada konsumen terakhir

Pedagangan eceran kecil terdiri dari:

- a) Eceran kecil berpangkalan, Eceran kecil yang berpangkalan ialah pedagang kecil yang mempunyai tempat yang tetap, seperti toko kecil, kios dan warung.
- b) Eceran kecil tidak berpangkalan adalah pedagang eceran yang tak mempunyai tempat usaha.

5. Tinjauan Tentang Pendapatan

a. Pengertian Pendapatan

Setiap pengusaha, dalam hal ini adalah pedagang kecil pasti dalam menjalankan usahanya mengharapkan adanya imbalan yang berupa pendapatan, karena pendapatan merupakan dasar penghidupan yang akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan material maupun kebutuhan spiritual. Timbal balik yang diperoleh berupa pendapatan atau penghasilan dalam bentuk uang maupun barang. Tingkat pendapatan seseorang akan mempengaruhi kuantitas dan kualitas kebutuhan.

Pengertian pendapatan dalam (<http://id.wikipedia.org/wiki/pendapatan>) menyatakan bahwa “pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh

perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan/atau jasa kepada pelanggan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja, sedangkan pengertian pendapatan menurut Undang-undang RI No. 10 Tahun 1994 pasal 14 ayat (1) seperti yang dikutip oleh Shofia Arini (2008: 19) adalah sebagai berikut :

Penghasilan adalah setiap tambahan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pendapatan atau penghasilan yang diterima dapat berupa uang dan dapat pula berupa barang dan jasa yang ditaksir atau dinilai dengan uang.

Pendapatan dapat dipandang dari dua segi yaitu penerimaan yang dihasilkan oleh diri sendiri maupun dari orang lain. Penerimaan dari diri sendiri adalah hasil dari segala kegiatan yang dilakukan seseorang itu sendiri, sedangkan pendapatan dari pihak lain dapat berupa pemberian ibadah, bonus atau balas jasa. dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah penerimaan baik yang berupa uang, barang atau jasa yang dinilai dengan uang yang diterima dari pihak maupun hasil usaha sendiri.

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Pendapatan Pedagang

pendapatan pedagang ditentukan oleh besar kecilnya usaha serta kuantitas dan kualitas transaksi penjualan yang terjadi. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi besar kecilnya usaha serta kuantitas dan kualitas transaksi penjualan. Menurut Shofia Arini (2008:20) menyatakan bahwa “Faktor yang mempengaruhi pendapatan pedagang meliputi modal usaha, pengalaman usaha, tingkat pendapatan, lokasi usaha, dan sikap besarnya ap usaha”. Penjelasan faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

1) Modal Usaha

Modal usaha atau capital adalah semua bentuk kekayaan yang dapat digunakan secara langsung maupun tidak langsung, dalam upaya untuk menambah penghasilan (output). Dalam usaha masalah modal mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan berhasil tidaknya suatu usaha yang telah didirikan.

2) Pengalaman Usaha

Pengalaman usaha identik dengan lamanya waktu seseorang menjalankan usahanya. Hal ini memberikan asumsi semakin lama seseorang menekuni usahanya, maka akan membuat orang tersebut akan berpengalaman juga dalam usahanya.

3) Tingkat Pendidikan

Pendidikan merupakan masalah penting bagi manusia. Pendidikan adalah suatu proses sosial dimana orang dihadapkan pada pengaruh lingkungan yang terpilih dan terkontrol, sehingga mereka dapat memperoleh atau mengalami perkembangan kemampuan social dan kemampuan individu yang optimum. Menurut Suryana (2003: 3) bahwa “ selain bekal kemampuan, wirausaha juga perlu memiliki pengetahuan dan ketrampilan”. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam pengembangan sumber daya manusia karena pendidikan tidak hanya menambah pengetahuan tetapi juga meningkatkan ketrampilan bekerja yang berdampak pada peningkatan produktifitas kerja.

4) Lokasi Usaha

Pemilihan lokasi usaha untuk dagang tidaklah mudah. Pedagang harus mampu melihat segala kemungkinan dari sudut pandang suatu lokasi. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan adalah faktor pesaing dan kondisi lingkungan tempat berjualan. Pada dasarnya para pedagang harus memilih lokasi tempat usaha yang strategis dan mudah dijangkau oleh para konsumen agar pendapatan yang diperoleh pedagang dapat maksimal.

5) Sikap Usaha

Sikap seorang pedagang merupakan sikap dalam mengembangkan usahanya, adanya sikap usaha dagang dalam diri pedagang menunjukkan adanya jiwa wiraswasta, yaitu adanya sikap untuk maju dan bekerja lebih giat.

B. Penelitian Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang membahas tentang kredit Program Pengembangan kecamatan (PPK) dilakukan oleh Lismining Tyas Budi Utami pada tahun 2006 dengan judul “Implementasi Pemberian Kredit Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang

Golongan Ekonomi Lemah Di Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan Tahun 2006”. Dari penelitian tersebut dapat diketahui bahwa pemberian kredit PPK dalam meningkatkan pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah yang meliputi: tahap persiapan (pendataan, sosialisasi program dan pembentukan kelompok), tahap pelayanan (pencairan dana, dan pengembalian angsuran), pembinaan dan pelaporan. Program Pengembangan Kecamatan memberikan bantuan kepada pedagang golongan ekonomi lemah dalam perbaikan ekonominya, selain itu terjadi banyak hambatan yang dialami pedagang golongan ekonomi lemah maupun hambatan dari pihak pengelola PPK. Hambatan yang dialami pedagang adalah kesulitan dalam membayar angsuran pinjaman. Hambatan dari pihak pengelola adalah masalah lokasi penerima bantuan yang rata-rata jauh dan belum dipergunakannya kredit PPK untuk tambahan modal.

Penelitian yang penulis susun ini memiliki beberapa relevansi dengan penelitian yang penulis temukan diatas yaitu pada prinsipnya dalam pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan (PNPM) Mandiri Perdesaan sama dengan pelaksanaan dari Program Pengembangan Kecamatan (PPK), Objek yang diteliti adalah para pedagang. Dampak yang ditimbulkan dari pemberian kredit adalah berupaya untuk meningkatkan pendapatan para pedagang, metode yang digunakan diskriptif kualitatif. Sedangkan perbedaannya, lokasi penelitian yang penulis pilih berada di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh **Ria Nuri Fitriawati pada tahun 2008 dengan judul “Implementasi Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (Pnpm) Mandiri Perdesaan Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah Di Kecamatan Plupuh kabupaten Sragen Tahun 2008”**. Dari hasil penelitian tersebut dapat diketahui bahwa (1) Prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi: pembentukan kelompok, pencairan dana, pengembalian/ pembayaran angsuran. (2) Pendapatan pedagang golongan ekonomi lemah setelah mendapat kredit PNPM Mandiri Perdesaan mengalami peningkatan yang berbeda-beda. (3) Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam proses pemberian/ pengajuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan yaitu sedikit mengalami masalah dalam proposal.

Sedangkan dalam proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh pedagang ada yang berpendapat prosesnya cepat tapi ada juga yang mengatakan lama. (4) Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan atau kendala tersebut yaitu para pedagang golongan ekonomi lemah tidak bisa berbuat apa-apa, mereka hanya pasrah dan menunggu. Sedangkan untuk jumlah kredit yang cair dan tidak sesuai dengan jumlah pengajuan, pengurus UPK berjanji untuk pengajuan kredit berikutnya akan diberikan sesuai dengan permohonan kredit.

Penelitian diatas memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis susun yaitu setelah penulis melakukan observasi terhadap PNPM Mandiri Perdesaan ternyata diketahui bahwa prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan, meliputi: pembentukan kelompok, pencairan dana, pengembalian/ pembayaran angsuran. Pemberian kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan diupayakan untuk membantu penambahan modal terhadap para pedagang sehingga berdampak pada meningkatnya pendapatan para pedagang,

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan alur berpikir yang digunakan dalam penelitian ini, yang digambarkan secara menyeluruh dan sistematis setelah mempunyai teori yang mendukung penelitian ini, maka dapat dibuat kerangka berpikir sebagai berikut :

Masyarakat atau rakyat merupakan sumber daya yang harus dikembangkan, agar mereka dapat berpartisipasi dalam pembangunan. Saat ini banyak sekali masyarakat miskin yang terpuruk oleh keadaan krisis global yang melanda Negara ini. Untuk mengembangkan usahanya mereka membutuhkan modal yang tidak sedikit sedangkan mereka hanya memiliki modal yang terbatas atau minim. Dengan modal mereka yang minim akibatnya produktifitas mereka rendah akhirnya berdampak pada pendapatan yang sedikit dan minim pula.

Melihat kondisi tersebut pemerintah memberikan bantuan untuk menanggulangi masyarakat miskin di Indonesia. Wujud dari bantuan ini adalah PNPM Mandiri dengan program pemberdayaan. Pemberdayaan merupakan pengembangan potensi yang dimiliki masyarakat khususnya masyarakat miskin

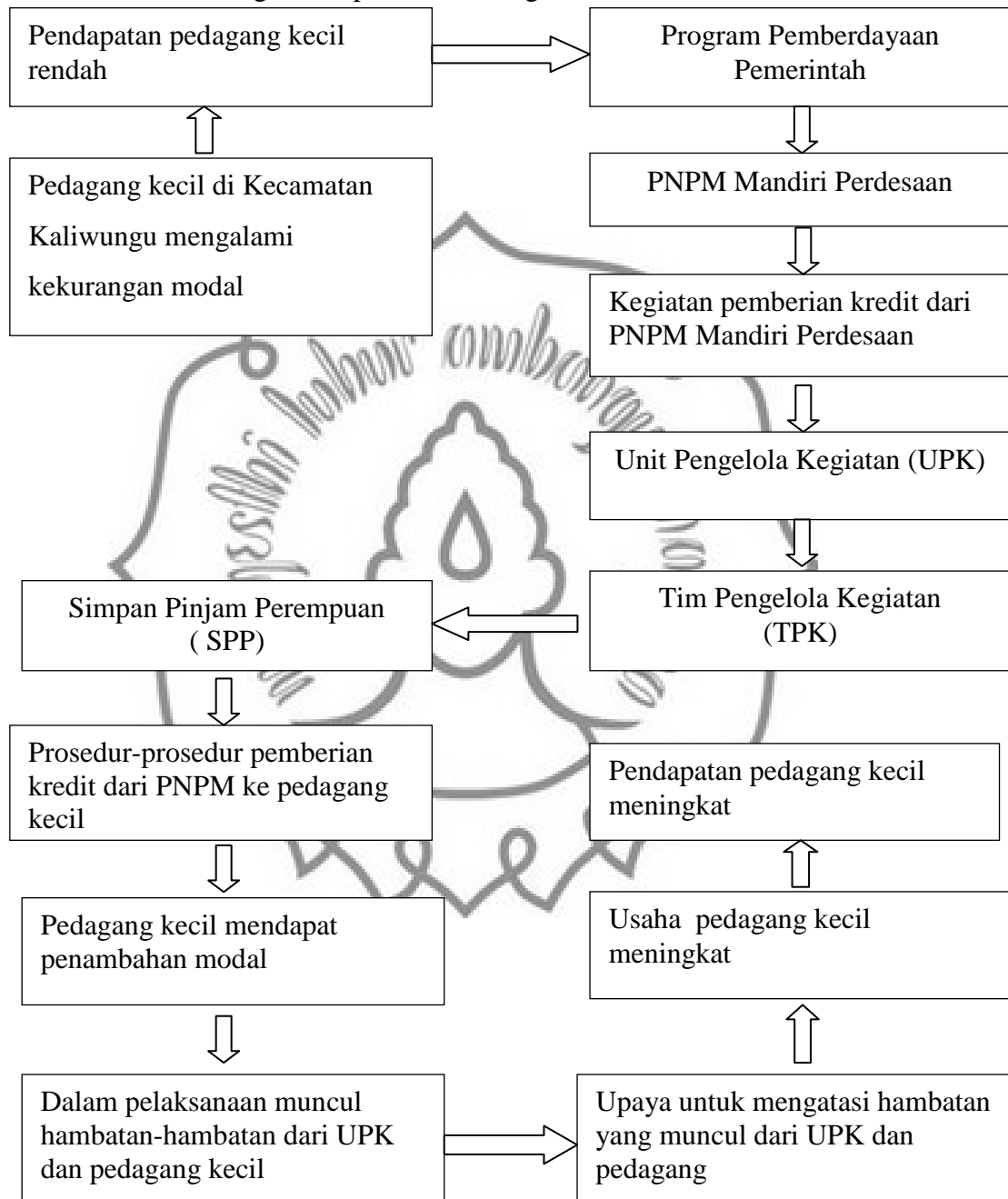
untuk mendorong dan memotivasi mereka menjadi sumberdaya yang berkualitas yang berdampak pada peningkatan produktifitas. Upaya pemerintah mempunyai empat program pemberdayaan masyarakat yang berbasis kewilayahan, yaitu Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang sekarang menjadi PNPM Mandiri Perdesaan, Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), Pengembangan Infrastruktur Sosial dan Ekonomi Wilayah (PISEW), dan Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK). Untuk membantu permodalan pedagang kecil di perdesaan pemerintah melaksanakan PNPM Mandiri Perdesaan.

PNPM Mandiri Perdesaan merupakan program untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di daerah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan memberikan bantuan untuk kegiatan sarana prasarana dasar (Jalan raya, Kesehatan, Pendidikan), Usaha Ekonomi Produktif (UEP) dan Simpan Pinjam Perempuan (SPP). Bantuan kredit untuk pedagang kecil ini termasuk dalam Simpan Pinjam Perempuan (SPP).

Pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini akan diberikan ke masyarakat dalam hal ini adalah pedagang kecil melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK). Dari UPK Kredit terlebih dahulu diberikan ke TPK (Tim Pengelola Kegiatan) yang berada di setiap desa-desa baru kemudian melalui TPK kredit diberikan ke kelompok SPP dalam hal ini diberikan ke masyarakat (pedagang kecil). Tetapi untuk mendapatkan pinjaman dana dari PNPM MD para pedagang kecil harus melewati prosedur-prosedur yang sudah ditentukan baru mereka akan mendapatkan tambahan modal.

Akan tetapi dalam pelaksanaan pemberian kredit dari PNPM MD ke pedagang kecil, pasti banyak terjadi hambatan baik dari pihak UPK maupun dari pedagang kecil itu sendiri. namun, hambatan yang muncul tidak mengakibatkan masyarakat enggan meminjam kredit dari PNPM. Dengan adanya pinjaman kredit ini diharapkan pedagang kecil memanfaatkan kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini untuk menambah modal dalam mengembangkan usahanya. Usaha yang berkembang diharapkan akan berdampak positif dengan meningkatnya pendapatan pedagang kecil.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran mengenai “ Implementasi Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang tahun 2009 “.



Gambar 1:Kerangka pemikiran tentang pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Kecamatan Kaliwungu

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini penulis laksanakan di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kaliwungu. Pemilihan tempat tersebut didasari pertimbangan sebagai berikut:

- 4) PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kaliwungu belum pernah dijadikan sebagai tempat penelitian khususnya penelitian mengenai pemasalahan yang sedang diteliti.
- 5) Tersedia data-data yang penulis butuhkan dalam mendukung kelancaran penulis dalam melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan.
- 6) PNPM Mandiri Perdesaan memberikan kredit yang memang diarahkan untuk modal usaha bagi para pedagang kecil di Kecamatan Kaliwungu.
- 7) Lokasinya mudah dijangkau dan strategis.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan waktu yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, waktu penelitian merupakan waktu yang diperlukan untuk mengumpulkan data penelitian mengenai implementasi pemberian kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Penelitian ini akan dimulai pada bulan Februari 2010 sampai dengan terselesainya laporan ini yang direncanakan selesai pada bulan Juli 2010.

Tabel 1. Jadwal penelitiannya adalah sebagai berikut:

Jadwal Penyusunan Skripsi	Feb 2010	Mar 2010	Apr 2010	Mei 2010	Juni 2010	Juli 2010
Pengajuan Judul						
Pengajuan Proposal						
Perijinan						
Pengumpulan Data						
Analisis Data						
Penyusunan Laporan						

B. Bentuk dan Strategi Penelitian

3) Bentuk Penelitian

Mengkaji suatu permasalahan secara utuh dan lengkap diperlukan suatu pendekatan permasalahan melalui bentuk penelitian yang tepat. Bentuk penelitian yang tepat akan mencerminkan kedalaman materi permasalahan yang disajikan. Penelitian ini menggunakan bentuk Deskriptif Kualitatif. Bentuk deskriptif kualitatif dipilih berdasarkan pada asumsi bahwa dengan pendekatan penelitian ini akan mendapatkan realita yang bersifat naturalisme pada obyek penelitian dan permasalahan yang diteliti akan diungkapkan secara detail dan mendalam.

Menurut Winarno Surakhmad (2004: 132):

Metode penelitian deskriptif adalah metode penelitian yang tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Penelitian deskriptif lebih merupakan istilah umum yang mencakup berbagai teknik deskriptif. Diantaranya adalah penelitian yang menuturkan, menganalisa dan mengklasifikasikan penyelidikan dengan *survey*, teknik test, studi kasus, studi komparatif, dan studi opsional.

Lebih lanjut Moleong (2009: 34) mengemukakan bahwa “Penelitian kualitatif itu cenderung untuk mencari dan menemukan dan menyimpulkan hipotesis; hipotesis dilihat sebagai sesuatu yang tentatif, berkembang, dan didasarkan pada sesuatu studi tertentu” Menurut Bodgan dan Taylor seperti dikutip Moleong (2009: 4) mendefinisikan metode kualitatif sebagai “Prosedur penelitian

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati”.

Nana Syaodih (2008: 60) mengatakan bahwa “Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.”

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu cara dalam meneliti suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan menghasilkan data pada masa sekarang yang berupa kata – kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Penelitian deskriptif kualitatif mempunyai karakteristik antara lain: berlatar belakang alamiah, mengandalkan manusia sebagai obyek penelitian, memanfaatkan data kualitatif, menggunakan analisis secara induktif, mengarahkan sasaran penelitian pada usaha menemukan teori dasar yang bersifat deskriptif, lebih mementingkan pada hasil, membatasi kajian pada fokus tertentu, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya dapat diterima oleh semua pihak. Sehingga bentuk ini dirasa penting dalam penelitian ini.

4) Strategi Penelitian

Setiap penelitian dapat mencapai hasil yang maksimal dengan menggunakan strategi penelitian. Strategi penelitian merupakan teknik pengumpulan dan menganalisis data agar dapat dilaksanakan secara ekonomis serta sesuai dengan tujuan penelitian.

H.B Sutopo (2006: 139) menjelaskan bahwa “Bentuk strategi penelitian dalam penelitian kualitatif bisa berupa studi kasus tunggal atau studi kasus ganda dan secara khusus dibedakan adanya jenis penelitian terpancang maupun holistik penuh”. Dalam penelitian kualitatif tingkatan penelitian dibagi dua yaitu :

- a. Studi kasus terpancang (*embedded research*), yaitu penelitian yang sudah terarah pada batasan atau fokus tertentu yang dijadikan sasaran dalam penelitian

- b. Studi kasus tidak terpancang (*penjelajahan/grounded reseach*) yaitu penelitian yang sejak awal penelitiannya tidak menyusun pertanyaan yang mengarah ke fokus tertentu, karena sasaran penelitiannya dengan beragam masalahnya belum diketahui atau sama sekali asing baginya.

Berdasarkan penjelasan di atas jenis penelitian kualitatif di bagi dua macam yaitu:

- a. Studi kasus tunggal, yaitu: bilamana penelitian tersebut terarah pada satu sasaran karakteristik.
- b. Studi kasus ganda, yaitu: bilamana penelitian tersebut memiliki lebih dari satu sasaran yang memiliki perbedaan karakteristik.

Strategi yang digunakan dalam penelitian ini adalah tunggal terpancang, dimana peneliti hanya mengkaji suatu masalah saja. Jadi, strategi tunggal terpancang yang digunakan dalam penelitian ini mengandung pengertian yaitu: tunggal artinya hanya ada satu ruang lingkup lokasi penelitian yaitu UPK Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang. Terpancang artinya pengumpulan data yang lebih terarah berdasarkan tujuan mengenai implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Kecamatan kaliwungu Kabupaten Semarang tahun 2010.

C. Sumber Data

Sumber data merupakan sumber dimana data dapat diperoleh. Data tidak akan dapat diperoleh tanpa adanya sumber data. Dalam memilih sumber data, peneliti harus benar-benar berfikir mengenai kemungkinan kelengkapan informasi yang akan dikumpulkan dan juga validitasnya. Menurut H. B sutopo (2006: 56), “Pemahaman mengenai berbagai macam sumber data merupakan bagian yang sangat penting bagi peneliti karena ketepatan memilih dan menentukan jenis sumber data akan menentukan ketepatan dan kekayaan data atau informasi yang diperoleh “. Lebih lanjut menurut Lofland seperti yang dikutip Lexi J. Moleong (2009: 157) mengemukakan bahwa “Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain”.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui implementasi pemberian kredit PNPM Mandiri Pedesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil, sehingga peneliti menggunakan sumber data antara lain:

1. Informan

Informan dalam hal ini memberikan keterangan yang berupa kata-kata. Berdasarkan kata-kata tersebut kemudian dianalisa dan hasil akhirnya ditarik kesimpulan kemudian disajikan dalam bentuk laporan. Agar mendapatkan data yang lebih valid diadakan cross cek antar informan yang satu dengan yang lainnya misalnya, antara keterangan para pedagang dengan pengurus PNPM Mandiri Pedesaan. Informan yang dipilih oleh peneliti adalah pengelola PNPM Mandiri Pedesaan dan pedagang kecil.

2. Sumber tertulis

Sumber tertulis yang berupa dokumen-dokumen, catatan-catatan, hasil laporan-laporan penelitian sebelumnya dan lain sebagainya.

3. Tempat penelitian

Tempat dan lokasi penelitian merupakan salah satu jenis sumber data yang harus dimanfaatkan oleh peneliti. Tempat penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah Kantor PNPM Mandiri Pedesaan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang dan tempat-tempat kegiatan usaha para pedagang kecil di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang.

D. Teknik Sampling

Lexy J Moleong (2009: 224) mengatakan bahwa “sampling ialah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber dan bangunanya (*constructions*)”. Sampling digunakan untuk menggali informasi yang menjadi dasar dari rancangan dan teori. *Teknik sampling* digunakan untuk menyeleksi agar pemilihan sampel sesuai dengan tujuan permasalahan yang diteliti. Menurut Lexy J Moleong (2009: 224) “Pada penelitian kualitatif tidak ada sampel acak tetapi sampel bertujuan (*purposive sample*)”. Sampel bertujuan dapat diketahui dari ciri-cirinya sebagai berikut:

1. Rancangan sampel yang muncul: sampel tidak dapat ditentukan atau ditarik terlebih dahulu.
2. Pemilihan sampel secara berurutan: tujuan memperoleh variasi sebanyak-banyaknya hanya dapat dicapai apabila pemilihan satuan sampel dilakukan jika satuannya sebelumnya sudah dijaring dan dianalisis.
3. Penyesuaian berkelanjutan dari sampel: pada mulanya setiap sampel dapat sama kegunaannya. Namun sesudah semakin banyak informasi yang masuk maka, sampel semakin dipilih atas dasar fokus penelitian.
4. Pemilihan berakhir jika sudah terjadi pengulangan: pada sampel bertujuan seperti ini jumlah sampel ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan. Jika tidak ada informasi yang dapat dijaring, maka penarikan sampel pun sudah dapat diakhiri. Jadi jika sudah terjadi pengulangan informasi maka penarikan sampel sudah harus dihentikan.

Peneliti hanya memilih informan yang benar-benar menguasai permasalahan yang dikaji, peneliti hanya mengamati kondisi lokasi penelitian yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Informan dapat bertambah atau berganti sesuai dengan kebutuhan yang ada di lapangan. Informan tersebut dapat menunjuk informan lain yang dipandang lebih tahu tentang permasalahan yang diteliti. Teknik penentuan informan seperti ini disebut teknik bola salju atau *snowball sampling*. H.B. Sutopo (2006: 65) menjelaskan teknik *snowball sampling* adalah peneliti dapat mengumpulkan data tanpa rencana, semakin lama semakin menemukan informan yang paling mengetahui informasi pada akhirnya akan menggali informasi secara lengkap dan mendalam, dengan demikian peneliti dapat terhindar dari pemborosan biaya, waktu, dan tenaga. Jadi penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dan *snowball sampling*.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang ditempuh untuk mendapatkan data yang diperlukan dengan menggunakan alat tertentu. Untuk dapat memecahkan permasalahan dengan tuntas dalam melaksanakan penelitian diperlukan data yang valid dan reliabel. Untuk mendapatkan data yang valid dan

reliabel, maka diperlukan suatu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Lexy J. Moleong (2009: 186) mengemukakan bahwa “wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang mewancarai (interviewees) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu”.

Adapun jenis wawancara menurut Patton seperti yang dikutip Moleong (2009: 187) adalah sebagai berikut:

a. Wawancara pembicaraan informal

Pada jenis wawancara ini pertanyaan yang diajukan sangat tergantung pada pewawancara itu sendiri, jadi tergantung pada spontanitas dalam mengajukan pertanyaan.

b. Pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara

Jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses wawancara.

c. Wawancara baku terbuka

Merupakan wawancara yang menggunakan seperangkat pertanyaan baku. Urutan pertanyaan, kata-kata, dan cara penyajiannya sama untuk semua informan.

Tehnik wawancara ini ditujukan kepada pengelola PNPM Mandiri Pedesaan dan Para pedagang kecil di kecamatan Kaliwungu. Kepada pengelola PNPM Mandiri Pedesaan untuk memperoleh gambaran umum mengenai keadaan di PNPM Mandiri Pedesaan yang belum diperoleh dengan teknik dokumenter dan observasi. Selain itu dipakai untuk mengetahui besarnya penghasilan pedagang kecil sebelum dan sesudah menerima kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan, mengetahui hambatan-hambatan yang dialami oleh pengelola PNPM maupun pedagang kecil dalam pelaksanaan pemberian kredit.

2. Observasi

Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang berupa peristiwa, aktivitas, perilaku, tempat atau lokasi, dan benda, serta rekaman gambar. Observasi dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Spradley yang dikutip oleh H. B Sutopo (2006: 75) menjelaskan bahwa pelaksanaan teknik dalam observasi dapat dibagi menjadi :

a. Observasi tak berperan

Kehadiran peneliti dalam observasi sama sekali tidak diketahui oleh subyek yang diamati.

b. Observasi berperan

1) Observasi berperan pasif

Kehadiran peneliti di lokasi sudah menunjukkan peran yang paling pasif, sebab kehadirannya sebagai orang asing diketahui oleh pribadi yang diamati dan hal itu membawa pengaruh pada yang diamati.

2) Observasi berperan aktif

Observasi berperan aktif merupakan cara khusus dan peneliti hanya sebagai pengamat, tetapi memainkan berbagai peran yang dimungkinkan dalam suatu situasi yang berkaitan dengan penelitiannya yang bersifat sementara.

3) Observasi berperan penuh

Peneliti memang memiliki peran dalam lokasi studinya sehingga benar-benar terlibat dalam suatu kegiatan yang ditelitinya.

Penelitian ini peneliti tergolong dalam kategori observasi berperan pasif, karena peneliti hanya datang ke lokasi tidak berperan apapun hanya mengamati dan menggali informasi yang berkaitan dengan penelitian.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan sumber data yang memiliki posisi penting dalam penelitian kualitatif. Dokumen bisa memiliki beragam bentuk, dari segi yang tertulis sederhana sampai yang lebih lengkap, dan bahkan bisa berupa benda-benda lainnya sebagai peninggalan masa lampau. Hadari Nawawi (1998: 133)

berpendapat bahwa studi dokumentasi adalah, “cara mengumpulkan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil/ hukum-hukum dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penyelidikan”. Menurut Moleong (2009: 216) mendefinisikan “Dokumen adalah setiap bahan tertulis maupun film yang digunakan sebagai sumber data yang dapat dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramal”.

Teknik dokumentasi dipakai untuk mendapatkan data Dokumen atau arsip yang berhubungan dengan pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang . Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berhubungan dengan besarnya pinjaman yang diberikan oleh PNPM MP, Struktur organisasi, dan deskripsi pemberian kredit.

F. Validitas Data

Guna memantapkan keabsahan data diperlukan teknik pemeriksaan data yang didasarkan pada suatu kriteria tertentu. Sedangkan dalam penelitian ini tehnik pemeriksaan data dilakukan dengan cara triangulasi.

Menurut Patton dalam H.B Sutopo (2006: 92-96) mengemukakan bahwa “membedakan empat macam teknik triangulasi sebagai teknik pemeriksaan data, yaitu:

1. Triangulasi sumber (data)

Teknik ini mengarahkan peneliti agar di dalam mengumpulkan data, ia wajib menggunakan beragam sumber data yang berbeda-beda yang tersedia. Artinya, data yang sama atau sejenis, akan lebih mantap kebenarannya bila digali dari beberapa sumber data yang berbeda.

2. Triangulasi metode

Teknik triangulasi ini bisa dilakukan oleh seorang peneliti dengan cara mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda.

3. Triangulasi peneliti

Trianggulasi peneliti merupakan hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti yang lain.

4. Trianggulasi teori

Trianggulasi jenis ini dilakukan oleh peneliti dengan menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan yang dikaji.

Jenis triangulasi yang digunakan untuk mencapai validitas data dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Menurut Lexi J. Moleong (2000: 178) menegaskan bahwa, “Trianggulasi data adalah teknik pemeriksaan validitas data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dari luar data itu untuk kepentingan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu”

Trianggulasi data dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa sumber untuk mengumpulkan data dengan permasalahan yang sama. Artinya dari berbagai sumber yang diperoleh di cek, recek, dan cross cek dan kemudian diuji keabsahannya. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil dari pengalaman, wawancara, dan analisis dokumen. Dengan demikian hasil akhir dari analisis mencapai tingkat mutu dan kevalidan yang tinggi.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses urut-urutan data dengan mengorganisasikan data kedalam suatu pola, kategori dan satuan urutan uraian dasar teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pola penelitian induktif yang diolah dengan teknik saling terjalin atau interaktif mengalir. Teknik interaksi mengalir yaitu model analisis yang menyatu dengan proses pengumpulan data dalam suatu rangkaian tertentu atau merupakan suatu siklus. Proses analisis data dengan model interaktif meliputi tiga komponen yaitu, pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan kesimpulan atau verifikasi.

Proses analisis data dalam penelitian kualitatif adalah sebagai berikut :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan selama data yang dibutuhkan belum memadai, dan akan dihentikan apabila data-data yang diperlukan telah memadai untuk

mengambil keputusan. Data kualitatif terutama terdiri dari kata-kata, bukan angka-angka. Data yang diperoleh dari wawancara, observasi maupun dokumentasi tersebut dikumpulkan menjadi satu untuk diproses lanjut.

2. Reduksi data

Data yang diperoleh dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terperinci. Laporan tersebut perlu direduksi, dirangkum, dan dipilah-pilah hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting, dicari pola atau temanya. Jadi laporan lapangan sebagai bahan disingkatkan, direduksi, disusun lebih sistematis, ditonjolkan pokok-pokok yang penting, sehingga lebih mudah dikendalikan. Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam, juga mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang diperoleh bila diperlukan.

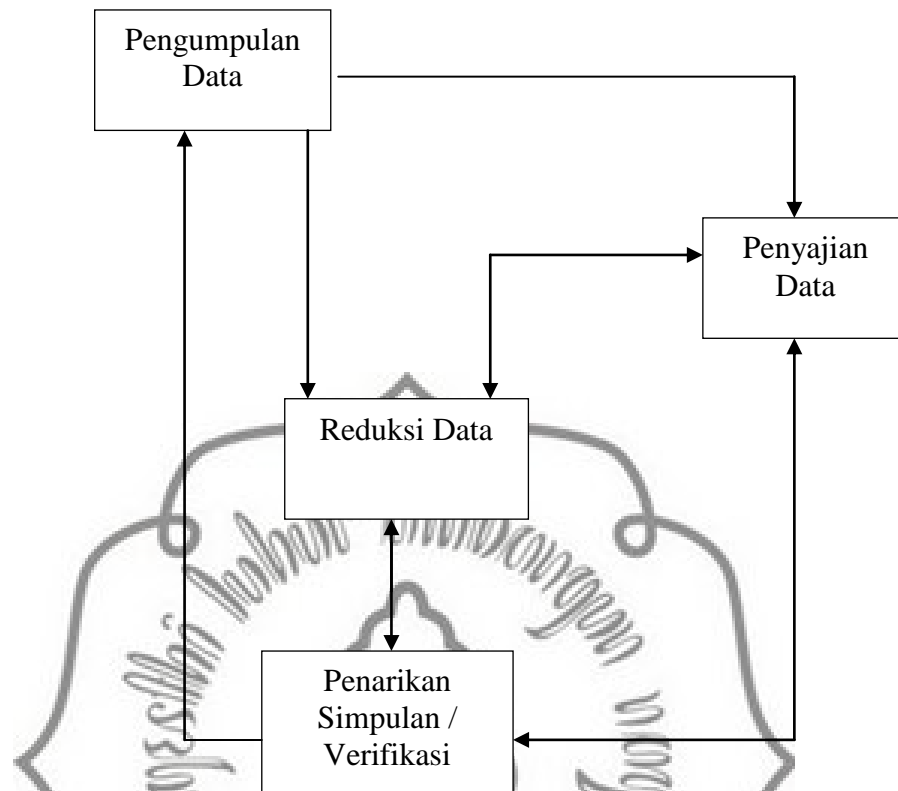
3. Penyajian data

Data yang tertumpuk, akan sukar untuk ditangani, sukar mencari hubungan antara data yang satu dengan yang lain dan sukar pula melihat gambaran keseluruhan untuk mengambil kesimpulan. Oleh karena itu, agar dapat melihat gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian perlu dibuat penyajian data.

4. Penarikan simpulan atau verifikasi

Sejak semula peneliti berusaha mencari data yang dikumpulkan, kemudian mencari pola, tema hubungan, persamaan hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data yang diperoleh kemudian dibuat suatu kesimpulan. Kesimpulan mula-mula bersifat tentatif, kabur, diragukan, akan tetapi dengan bertambahnya data, kesimpulan itu akan lebih mantap yaitu pernyataan yang telah memiliki landasan kuat dari proses analisis data yang dilakukan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dapat segera ditarik kesimpulan yang bersifat sementara, sehingga diperoleh kesimpulan yang mantap.

Lebih jelasnya berikut ini peneliti sajikan skema model analisis interaktif:



Gambar 2: Komponen-komponen Analisis Data Model Interaktif
(Sumber: Mathew B. Milles dan A. Michael Huberman, 1992: 20)

H. Prosedur Penelitian

Prosedur penelitian merupakan rangkaian kegiatan(tahapan) yang harus ditempuh dari awal sampai akhir penelitian. Kegiatan ini dimulai sejak pembuatan proposal, mengurus perijinan, pelaksanaan penelitian di lapangan, Dalam penelitian ini prosedur atau langkah langkah pembuatan laporan adalah sebagai berikut :

1. Tahap pra lapangan

Tahap ini dilakukan dari pemilihan lokasi, penentuan permasalahan, mengurus perijinan dan persiapan perlengkapan.

2. Tahap Lapangan

Tahap lapangan ini dilakukan dari penggalian data yang relevan dengan tujuan penelitian. Tahap ini peneliti mulai mengeksplorasi data yang ada di

lapangan kemudian dikumpulkan untuk memasuki dikumpulkan untuk memasuki tahap analisis data.

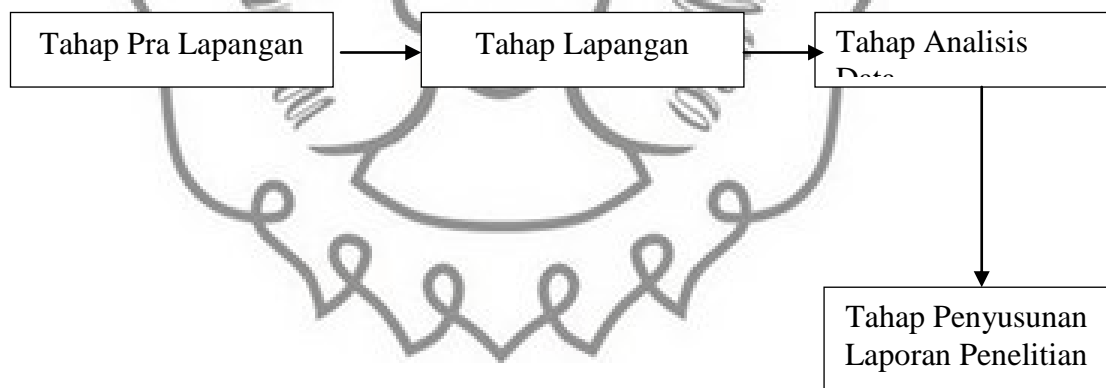
3. Tahap Analisis Data

Tahap analisis data dilakukan bersamaan dengan tahap pengumpulan data untuk menghindari data yang tercecer karena dianggap tidak berguna atau hilang. Proses analisis data dalam penelitian ini meliputi: pengelompokan data, penganalisaan data kemudian ditarik suatu kesimpulan dari analisis yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu persiapan penyajian data secara jelas dan rinci dalam suatu laporan.

4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini merupakan tahap akhir dari prosedur-prosedur sebelumnya. Pada tahap ini hasil dari pengumpulan data diolah dan dianalisa kemudian dilaporkan dalam bentuk skripsi.

Bagan prosedur penelitian adalah sebagai berikut:



Gambar 3: Prosedur Penelitian

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Letak dan Kondisi Geografis Kecamatan Kaliwungu

Kecamatan Kaliwungu merupakan salah satu wilayah kecamatan yang berada di Kabupaten Semarang yang terletak di arah tenggara dari ibukota kabupaten dan tenggara dari arah ibukota Provinsi Jawa Tengah. Dapat dijangkau dengan jalan darat dari ibukota provinsi selama kurang lebih 2 jam. Lebih jelasnya dibawah ini terdapat gambar peta Kecamatan Kaliwungu sebagai berikut:



Gambar 4. Peta kecamatan Kaliwungu

sumber : arsip Kecamatan Kaliwungu

Posisi Kecamatan Kaliwungu berbatasan dengan:

- 1) Sebelah timur Kabupaten Boyolali
- 2) Sebelah barat Kecamatan Ampel
- 3) Sebelah utara Kecamatan Susukan
- 4) Sebelah selatan Kabupaten Boyolali

Kecamatan Kaliwungu, Kab. Semarang Prov Jawa Tengah memiliki luas wilayah 2.995.319 Ha. Kecamatan 53 terdiri dari 11 desa/kelurahan, yaitu

meliputi Kaliwungu, Jetis, Kener, Kradenan, Mukiran, Pager, Papringan, Payungan, Rogumulyo, Siwal, dan Udanwuh. Jumlah penduduk 28.911 jiwa, terdiri 7.529 KK. Sebanyak 2.944 KK (39.1%) dikategorikan sebagai keluarga miskin. Mata pencaharian masyarakat mayoritas adalah Petani. Potensi sumberdaya alam yang potensial adalah Sawah.

Kecamatan Kaliwungu terdiri atas lahan persawahan seluas 962.631 Ha dan lahan kering seluas 1.882.689 Ha dari wilayah keseluruhan. Lahan persawahan terbagi menjadi sawah teririgasi (901.468 Ha) dan sawah tadah hujan (61.145 Ha). Lahan kering terdiri dari ladang (tegalan) sebesar 769.344 Ha, permukiman pekarangan & bangunan sebesar 1.012.925 Ha, usaha lain sebesar 100.420 Ha.

b. Kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Kecamatan Kaliwungu

Penduduk Kecamatan Kaliwungu mempunyai mata pencaharian yang beranekaragam. Adapun data mata pencaharian penduduk Kecamatan Kaliwungu dapat dilihat pada table 2.

Tabel 2 : Penduduk Kecamatan Kaliwungu Menurut Mata Pencaharian

N o	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Pertanian	12.450
2	Industri pengolahan	864
3	Bangunan	267
4	Perdagangan	4.092
5	Angkutan	326
6	Keuangan, sewa dan jasa perusahaan	1.250
7	Jasa kemasyarakatan	508
8	Rumah usaha/ kerajinan	3.752
	Jumlah	24.584

Sumber: Monografi Kecamatan tahun 2009

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa mayoritas penduduk Kecamatan Kaliwungu adalah bermata pencaharian sebagai petani. Namun penduduk yang

memilih berprofesi sebagai pedagang juga tidak sedikit, jumlah pedagang menduduki peringkat ke 2 setelah petani.

Kecamatan Kaliwungu terdapat usaha-usaha produktif yang menjadi mata pencaharian penduduknya. Usaha yang dijalani oleh penduduk harus didukung dengan adanya sarana dan prasarana. Sarana perekonomian di Kecamatan Kaliwungu terlihat pada tabel 3:

Tabel 3: sarana perekonomian di Kecamatan Kaliwungu

Jenis usaha	Jumlah
Koperasi	16
Toko, kios, warung	655
Pasar umum	2
Pasar desa	4
Lembaga Keuangan (Bank)	3

Sumber: Monografi Kecamatan, tahun 200

Banyaknya sarana prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, mendorong pengelola PNPM MP untuk lebih memfokuskan penggunaan dana kredit guna membantu masyarakat yang berupa pinjaman tambahan modal kepada masyarakat yang memiliki usaha produktif, sehingga diharapkan usaha produktif yang dijalankan penduduk Kecamatan Kaliwungu dapat mengalami peningkatan yang lebih baik.

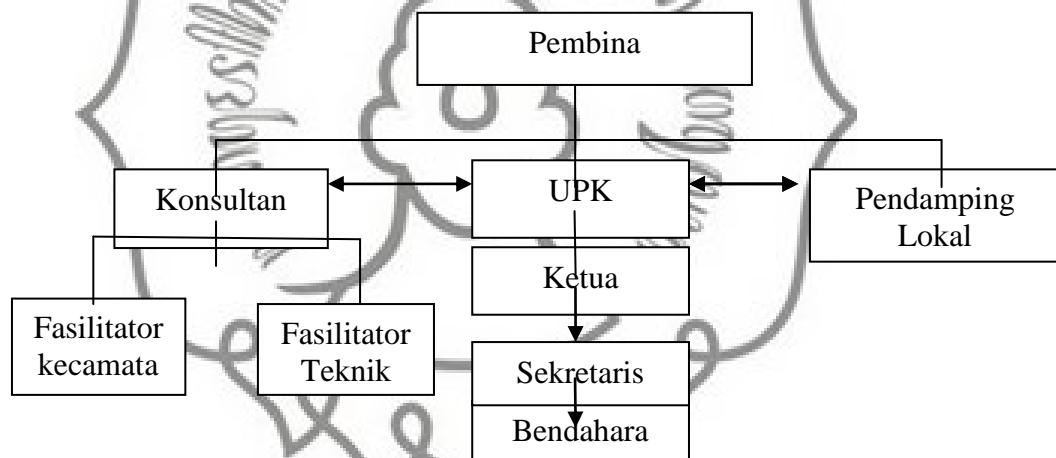
2. Gambaran Umum Implementasi Pemberian Kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kaliwungu

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan sasarannya adalah pada RTM (Rumah Tangga Miskin) di Kecamatan Kaliwungu, yang memfokuskan pada pemberian modal usaha atau tambahan modal usaha kepada penduduk khususnya pedagang kecil.

Kecamatan ini telah berpartisipasi dalam PPK Mandiri sejak tahun 2005, dan sampai saat ini telah mendapat alokasi BLM PPKM Th I Rp.300.000.000 (TA 2005), PPKM Th II Rp.500.000.000 (TA 2006), dan PPKM Th III Rp 500.000.000 (TA 2007). Memasuki TA 2008 kecamatan ini berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan dengan BLM sebesar Rp 1.250.000.000 (TA 2008) dan PNPM MD Tahun ke II sebesar Rp.900.000.000 (TA 2009).

Selama periode 2005 s/d 2009 Unit Pengelola Kegiatan (UPK) ini telah mengelola dana program yang diterima dalam bentuk Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan disalurkan langsung kepada masyarakat salah satunya dalam bentuk pinjaman/kredit modal usaha kepada masyarakat (pedagang kecil khusus kelompok perempuan). Selain itu BLM ini juga digunakan untuk kegiatan pembangunan prasarana desa, kegiatan usaha ekonomi produktif (UEP) dan kegiatan pendidikan dan kegiatan kesehatan.

Mendukung kelancaran pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat, maka dibentuk pengurus yang mengelola dana tersebut. Pengurus UPK atau pengelola dibentuk berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Desa. Sedangkan untuk pendamping dari kecamatan dibentuk dari pemerintah kabupaten. Adapun susunan pengelola PNPM MP Kecamatan Kaliwungu adalah sebagai berikut:



Gambar 5 : Struktur Organisasi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kaliwungu

Sumber : Arsip PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kaliwungu

Pembina	: Iskanto, S.Sos
Fasilitator Kecamatan	: Dwi Retno Wulan, SE
Fasilitator Teknik	: Respati Adi WK, ST
Ketua UPK	: Retnaningtyas
Sekretaris UPK	: Sri Patmi
Bendahara UPK	: Deisy Ari Wardani

Pelaksanaan PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kaliwungu berlangsung sejak tahun 2008. Adapun jumlah kelompok peminjam dapat dilihat pada tabel 4 berikut:

Tabel 4. Jumlah kelompok Simpan Pinjam Perempuan Penerima Bantuan Kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang

No	Kelurahan	Jumlah Kelompok SPP
1	Kaliwungu	14
2	Jetis	14
3	Kener	8
4	Kradenan	9
5	Mukiran	5
6	Pager	7
7	Papringan	9
8	Payungan	7
9	Rogumulyo	6
10	Siwal	5
11	Udanwuh	3
	Jumlah	87

Sumber: Tutup buku 2009

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah kelompok penerima bantuan kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kaliwungu khususnya untuk kelompok SPP sebanyak 87 kelompok. Adanya program ini mengharuskan semua desa yang berada di Kecamatan kaliwungu harus ikut berpartisipasi dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Kredit PNPM MP ini diberikan kepada masyarakat khusus perempuan yang tergolong miskin namun yang mempunyai usaha karena pada umumnya masyarakat golongan ini kekurangan dalam hal permodalan.

Dana pinjaman yang diberikan dari PNPM MP kepada masyarakat pedagang kecil dikembalikan dengan batas angsuran 10-12 bulan berdasarkan kesepakatan bersama. Angsuran tiap bulan adalah pokok ditambah jasa. Rincian jasa atau suku bunga yang harus dibayar adalah 1,5% per bulan. Pembayaran bunga tersebut 0,15% digunakan untuk operasional Tim Pengelola Kegiatan (TPK) dan 0,25% untuk IPTW (Insentif Pengembalian Tepat Waktu). IPTW akan dikembalikan kepada ke pedagang kecil dengan catatan mereka membayar angsuran tepat pada waktunya, tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan. Jika ternyata pembayaran angsuran mengalami keterlambatan, maka IPTW tidak bisa diberikan dari pihak UPK kepada pedagang kecil.

B. Deskripsi Permasalahan Penelitian

Sejalan dengan permasalahan yang peneliti kaji yaitu tentang implementasi pemberian kredit PNPM MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil, maka untuk memberikan gambaran mengenai data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut dapat dilihat dari prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang, pendapatan pedagang kecil setelah mendapat bantuan kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan, hambatan yang dihadapi pedagang kecil dalam proses pemberian kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan dan upaya yang dilakukan pedagang kecil untuk mengatasi hambatan tersebut, hambatan yang dihadapi PNPM Mandiri Perdesaan dalam proses pemberian kredit kepada pedagang kecil dan upaya yang dilakukan PNPM Mandiri Perdesaan untuk mengatasi hambatan tersebut. Mengenai data tersebut dikemukakan sebagai berikut :

1. Prosedur Pemberian Kredit Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kecil Di Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Semarang tahun 2009”.

Prosedur pemberian kredit merupakan langkah-langkah atau tahapan untuk mendapatkan pinjaman kredit. Adapun prosedur pemberian kredit PNPM MP di Kecamatan Kaliwungu adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan kelompok

Kredit PNPM MP ini tidak diberikan secara perorangan tetapi diberikan secara kelompok. Dalam pembentukan kelompok sepenuhnya diberikan kepada masyarakat yang ditunjuk sebagai kelompok sasaran. Jumlah anggota kelompok minimal 5 orang. Syarat untuk membentuk kelompok adalah para RTM yang mempunyai usaha produktif, kepengurusannya jelas dan diketahui oleh kadus setempat, RT/RW. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Darsono selaku pendamping lokal PNPM MP sebagai berikut:

Proses dari penggunaan dana pinjaman PNPM MP dengan cara diadakan Musyawarah Dusun yang dihadiri oleh aparat desa seperti kepala dusun, RT,RW. Disitu memberikan penjelasan mengenai penggunaan dana pinjaman PNPM Mandiri Perdesaan, yaitu dengan membentuk kelompok

minimal 5 orang. Sedangkan syarat yang boleh membuat kelompok hanya RTM yang mempunyai usaha produktif, kepengurusannya cetho dan diketahui oleh kadus setempat RT/RW.”(wawancara bapak darsono 4 mei 2010).

Penuturan Bapak Darsono tersebut sesuai dengan penuturan Ibu Solikhah sebagai berikut:

Saya mendengar informasi mengenai pinjaman PNPM MP waktu kempalan RT mbak. Waktu itu saya lagi membutuhkan dana untuk modal jualan pakaian. Kemudian saya dan teman-teman membentuk kelompok 10 orang, katanya pak RT itu syarat untuk mengajukan dana ke PNPM MP.

(wawancara Ibu Solikhah, 4 mei 2010).

Meskipun ada syarat bahwa bantuan dana hanya diberikan kepada RTM yang produktif, tetapi dari hasil pengamatan peneliti di lapangan ternyata peminjam tidak hanya dari RTM saja, ada juga peminjam yang berasal dari kalangan masyarakat mampu. karena UPK berasumsi masyarakat yang mengajukan pinjaman dari keluarga mampu serta dianggap mampu dalam hal pengembalian angsuran, UPK berkenan memberikan pinjaman.

Pembentukan kelompok tersebut diserahkan penuh kepada kelompok sasaran, karena dianggap lebih efektif. Sedangkan untuk pemilihan ketua kelompok harus bertanggung jawab terhadap penyetoran angsuran dari anggota, selain itu dia merupakan orang pertama yang akan mendapat teguran jika kelompok tersebut mengalami penyimpangan dari prosedur yang ada. Seperti diungkapkan Ibu Suparmi selaku ketua kelompok berikut ini:

Setelah kelompok sudah terbentuk, saya ditunjuk untuk menjadi ketua kelompoknya mbak. Tetapi jadi ketua kelompok tidak enak. Tanggung jawabnya lebih besar. Apalagi kalau pas waktu angsuran ada anggota yang belum bisa mengangsur saya terpaksa harus nombokin dulu mbak. (wawancara Ibu Suparmi, 10 Juli 2010).

Setelah terbentuk kelompok dengan kepengurusan yang jelas dan diketahui oleh Kadus setempat, RT maupun RW. kelompok tersebut segera mengajukan permohonan dana kepada Unit Pengelola Kegiatan (UPK) PNPM Mandiri Perdesaan. Pengajuan dana ini setiap kelompok harus membuat proposal pengajuan dana yang dilampiri foto copy KTP dan foto copy Kartu Keluarga

(KK) masing-masing anggota yang kemudian disahkan oleh kepala desa atau TPK. Setelah itu proposal masuk ke dalam daftar validasi proposal. Di dalam daftar validasi proposal akan diidentifikasi awal mengenai jumlah kelompok, jumlah pinjaman dan merupakan kelompok lama atau kelompok baru. Baru kemudian proposal masuk ke dalam daftar antrian. Langkah selanjutnya Tim Verifikasi mengadakan survey studi kelayakan usaha kekelompok-kelompok sasaran sesuai dengan daftar antrian kelompok. Mengenai survey studi kelayakan usaha tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sulastri berikut ini,” Kelompok sini dulu juga di survey kok mbak. Dilihat usahanya oleh petugas ...”. (wawancara: Ibu Sulastri, 4 Mei 2010).

Penuturan diatas didukung oleh pernyataan Bapak Kiar selaku Ketua TPK desa Mukiran sebagai berikut:

“Bermula kelompok mengajukan proposal ke TPK yang sudah dilampiri fotokopi KK, dan KTP. Setelah diketahui oleh Kepala Desa dan Ketua TPK. Proposal tersebut diajukan ke UPK. di UPK proposal tersebut di cek kembali. Kemudian Tim Verifikasi mengadakan survey mengenai kepastian keanggotaan, jenis usaha, dan apakah data sesuai dengan proposal. Hasil survey direkomendasikan kepada UPK” (wawancara: Bapak Kiar, 4 juni 2010).

Pernyataan sama juga diungkapkan oleh Ibu Iin selaku tim verifikasi sebagai berikut:

kelompok baru yang mengajukan pinjaman, kita survey dulu kekelompoknya. Terutama mengenai jenis usaha yang dijalani oleh masing-masing anggota. Untuk pengguna yang sudah atau pernah meminjam. Kita janji dengan kelompoknya untuk mendata ulang mengenai identitas dari anggota kelompok baik KTP maupun KK dan menanyakan setelah mendapat bantuan kredit dari PNPM MP usaha yang dijalani mengalami peningkatan atau tidak. (Wawancara: Ibu Iin, 4 juni 2010).

Studi kelayakan usaha dimaksudkan untuk mengetahui kesesuaian antara permohonan dana dengan jenis usaha yang dijalankan. Tim verifikasi melakukan pemeriksaan serta penilaian usulan kegiatan semua desa peserta PNPM Mandiri

Perdesaan dan selanjutnya membuat rekomendasi kepada musyawarah antar desa sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan. Jika rekomendasi Tim verifikasi kepada pihak UPK dinyatakan layak maka dana akan segera dicairkan dengan catatan desa yang bersangkutan tidak ada masalah tunggakan.

b. Pencairan Dana

Proses pencairan dana dilakukan langsung oleh petugas UPK dari Kecamatan Kaliwungu setelah mendapat rekomendasi dari Tim Verifikasi bahwa kelompok tersebut memang layak dan dengan catatan desa yang bersangkutan tidak mengalami masalah tunggakan. Berdasarkan observasi peneliti pencairan dana dilakukan petugas UPK Kecamatan Kaliwungu ke kelompok sasaran, mereka langsung mendatangi dan mengumpulkan kelompok yang mengajukan pinjaman kredit, tanpa diadakan Musyawarah Antar Desa terlebih dahulu.

Pihak-pihak yang ikut dalam proses perguliran dana adalah TPK (3 orang), KPMD, dan kelompok yang bersangkutan. Tetapi, realita di lapangan yang hadir hanya TPK (1 orang) dan anggota kelompok. Apabila anggota kelompok terpaksa ada yang tidak bisa hadir saat pencairan dana karena alasan tertentu maka ketua kelompok harus bertanggung jawab atau pengambilan dana bisa diwakilkan oleh anggota lain atas persetujuan anggota yang tidak bisa hadir. Hal ini seperti diungkapkan oleh Mbak Deisy selaku bendahara PNPM Mandiri Perdesaan berikut ini:

Pencairan dana diserahkan langsung ke masing-masing anggota kelompok, jika anggota ada yang tidak hadir, maka ketua yang harus bertanggung jawab. Atau pengambilan dana bisa diwakilkan oleh anggota lain yang tentunya sudah mendapatkan persetujuan dari anggota yang tidak hadir tersebut. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan uang itu jelas.

(Wawancara: Mbak Deisy, 4 Mei 2010)

Dana yang cair kepada para pedagang kecil, sangat tergantung pada survey studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi. Pada pengajuan pertama, dana yang turun tidak sesuai dengan permohonan yang diajukan. Dana yang tidak sesuai denganajuan hal ini dipengaruhi oleh beberapa pertimbangan yaitu merupakan kelompok baru yang masih dalam tahap percobaan, kondisi/jenis usaha, kemampuan kelompok sasaran dalam membayar angsuran yang dilihat dari

penghasilan pedagang, dan menyelami rekomendasi dari Tim verifikasi. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Mbak Retno selaku ketua UPK sebagai berikut:

Untuk kelompok baru yang pertama mengajukan pinjaman, dana yang turun tidak sesuai dengan besarnyaajuan dari kelompok sasaran, ini disebabkan beberapa pertimbangan antara lain tergolong kelompok baru, Menyelami rekomendasi dari Tim Verifikasi dan dilihat dari jenis usaha yang dikerjakan oleh anggota...

(Wawancara: mbak Retno, 24 juni 2010)

Sebagaimana ungkapan Mbak Retno diatas, pencairan dana secara pribadi juga diungkapkan oleh Ibu Tri Bawanti berikut ini, "...iya mbak waktu pencairan pertama, dana yang turun cuma 1 juta, padahal dari kelompok mengajukan masing-masing anggota sebesar 2 juta. Tetapi setelah diberi penjelasan dari petugas UPK, kami bisa mengerti kalau untuk kelompok baru ketanya masih buat uji coba gitu." (wawancara: Ibu Bawanti 20 mei 2010).

Pengajuan dana yang kedua warga desa Kaliwungu dapat bernafas lega karena dana yang mereka ajukan sudah sesuai dengan besarnyaajuan yang mereka inginkan. Jadi jumlah pinjaman yang diajukan pedagang sudah sesuai dengan besarnyaajuan. Seperti yang diungkapkan Ibu Suparmi selaku ketua kelompok berikut ini:

Alhamdulillah untuk kelompok saya, pinjaman yang kedua ini jumlahnya sesuai dengan jumlah yang kami ajukan. Kelompok sini mengajukan Rp 20.000.000,00 untuk 10 orang anggota dan Alhamdulillah yang cair juga sebesar Rp 20.000.000,00.

(Wawancara: Ibu Suparmi, 10 Juli 2010).

Pernyataan yang sama juga dituturkan oleh Ibu Sugiyem selaku pedagang sayuran” waktu pencairan dana kedua saya mendapat 2 juta mbak itu sama jumlahnya dengan yang diajukan dari kelompok kami”. (wawancara Ibu Sugiyem, 4 juni 2010)

Tahap pencairan dana, pelayanan pada kelompok sasaran terkesan mudah dan tidak berbelit-belit terbukti dengan tidak adanya keluhan dalam hal pencairan dana.

c. Pengembalian Angsuran

Pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal pencairan dana. Seperti yang telah disepakati jangka waktu angsuran antara 10 dan maksimal 12 bulan setiap kali pinjaman. Jangka waktu tersebut disesuaikan dengan perjanjian awal saat mengajukan kredit. Angsuran disetorkan ke kantor PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Kaliwungu. Misal kelompok meminta agar pembayaran angsuran dimundurkan dari tanggal pencairan pihak PNPM MP akan mengabulkan dengan catatan akan dibuat dalam berita acara.

Angsuran yang dibayar pedagang ke UPK dikenai bunga jasa 1,5%. 0.25% untuk IPTW yang akan dikembalikan ke pedagang jika membayar angsuran tepat waktu, 0,15% untuk operasional TPK. Berdasarkan observasi penulis, ternyata setelah dana tersebut turun ke kelompok, ada beberapa kelompok yang masih mengenakan beban tambahan administrasi. Ada tidaknya beban administrasi tersebut berdasarkan kesepakatan kelompok itu sendiri, berapa jumlahnya juga kelompok yang menentukan. Beban tersebut mereka bayar untuk perkembangan kelompok mereka. hampir semua peminjam merasa tidak keberatan terhadap bunga yang diberikan. Seperti yang diungkapkan Sumarni berikut ini:

“...kalau menurut saya bunganya tidak seberapa. Masyarakat juga mengetahui kalau bunga itu untuk menggaji pengurusnya dan untuk pengembangan kelompok. Karena bunganya yang terjangkau saya sudah minjam 3 kali ini..

(Wawancara: Ibu Sumarni, 4 Mei 2010).

Kesepakatan antara tim pengelola dan kelompok sasaran, pembayaran angsuran tidak bisa dilaksanakan per orang. Angsuran dikumpulkan pada ketua kelompok masing-masing. Setelah dana terkumpul ketua kelompok menyetorkan angsuran ke TPK agar lebih efisien dan mudah dalam melakukan koordinasi. Namun pembayaran lewat TPK seringkali macet. kenyataan di lapangan banyak dari ketua kelompok yang langsung menyetorkan ke kantor PNPM MP Kaliwungu setiap tanggal angsuran. Seperti yang diungkapkan Ibu sulastri selaku ketua kelompok berikut ini:

Setiap tanggal angsuran saya yang datang ke kantor PNPM mbak, pernah sekali waktu mengangsur saya kasih ke TPK, tapi ternyata TPK tidak langsung menyetor ke kantor PNPM. Sampai melewati tanggal jatuh tempo. Setelah itu saya kapok mbak, mending langsung tak setor ke kantor.

(Wawancara: Ibu Sulastri, 4 Mei 2010).

Meskipun angsuran dibayarkan oleh ketua kelompok ke UPK. Pihak TPK harus tetap mengontrol kelancaran angsuran kredit. Menanyakan kepada ketua kelompok mengenai keadaan anggotanya juga hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dana itu sendiri sehingga bila ada hal-hal yang memerlukan penanganan langsung dari tim pengelola, langsung bisa diatasi dengan berusaha meminimalkan kesalahan yang ada.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti di lapangan masih ada ditemukan kredit macet di beberapa desa yaitu desa Kaliwungu dan desa kredenan. Kasusnya sama yaitu ada peminjam yang menunggak angsuran sampai beberapa kali angsuran, akhirnya ketua kelompoklah yang bertanggung jawab. Jika ketua kelompok tidak bisa menangani maka desa bersangkutan ikut bertanggung jawab terhadap anggota yang mengalami keterlambatan angsuran. karena jika ada anggota yang mengalami penyimpangan dalam hal pembayaran angsuran dan tidak segera diatasi, maka berdampak terhadap semua kegiatan desa yang melibatkan PNPM Mandiri Perdesaan karena sanksinya adalah tanggung renteng. Seperti yang diungkapkan Mbak Retno selaku Ketua UPK berikut ini:

...anggota yang mengalami tunggakan dalam angsuran, dan kelompok tersebut tidak bisa menyelesaikan tunggakan itu maka desa yang bersangkutan ikut bertanggung jawab karena adanya tanggung renteng, jadi semua warga desa yang bersangkutan ikut menanggung. Apabila desa tersebut tidak bisa menyelesaikan tunggakan berdasarkan jangka waktu yang telah disepakati antara UPK dan desa maka desa tersebut akan menerima sanksi program yaitu untuk periode selanjutnya desa tersebut tidak bisa ikut dalam partisipasi PNPM MP.

(wawancara: mbak Retno, 14 Juni 2010)

Kelompok yang mengalami penunggakan angsuran, dan tidak segera dilunasi dalam jangka waktu sudah ditentukan maka sebagai bentuk sanksi bagi desa yang menunggak pengembaliannya maka besar dana tidak akan digulirkan ke desa tersebut berdasarkan kesepakatan dalam Musyawarah antar Desa dan untuk tahap berikutnya desa tersebut tidak bisa mendapatkan dana dari PNPM.

2. Pendapatan Pedagang setelah menerima kredit dari PNPM

Mandiri Perdesaan Kaliwungu

Adanya kredit PNPM MP merupakan upaya untuk meningkatkan pendapatan para pedagang kecil. Dengan adanya pemberian kredit PNPM MP banyak usaha-usaha kecil yang muncul antara lain jualan pakaian, jualan sayur dan usaha lain yang dikembangkan dalam rumah tangga. Dengan dana tersebut beberapa keluarga memanfaatkan untuk modal membuka usaha baru. Seperti yang diungkapkan Ibu Solikhah selaku pedagang pakaian sebagai berikut:

“Dulu sebelum ada kredit dari PNPM, saya tidak bekerja mbak, Cuma jadi Ibu Rumah Tangga. Penghasilan keluarga juga minim, untuk memenuhi kebutuhan harus utang sana sini. Setelah ada pinjaman dari PNPM, dana tersebut langsung saya gunakan untuk modal dagang pakaian mbak. Dan alhamdulillah, sekarang pendapatan di keluarga juga sudah lumayan”.
(Wawancara: Ibu Solikhah, 4 Mei 2010).

Penuturan yang serupa juga diungkapkan oleh Mbak Retno berikut ini:

Sejauh ini berdasarkan pemantauan dari PNPM kepada RTM yang menggunakan dana pinjaman untuk membuka usaha baru maupun menambah modal untuk usaha yang sudah mereka jalani. Dari hasil survey kita, kondisi pedagang mengalami peningkatan khususnya dari segi finansial.
(Wawancara: Mbak Retno, 14 Juni 2010).

Sampai pada tahap mempertahankan usaha, pelaksanaan program PNPM MP bisa dikatakan mencapai target yaitu menyelamatkan pedagang kecil yang mempunyai usaha produktif meskipun target yang dicapai belum sepenuhnya. berbagai kasus yang ada, Nampak bahwa pelaksanaan program PNPM MP tersebut dapat dikatakan terjadi peningkatan pendapatan pada kelompok sasaran. Seperti yang diungkapkan Ibu sugiyem berikut ini, “Sebelum ada pinjaman ini, jualan saya agak tersendat mbak,, tapi untung ada pinjaman dari PNPM, uang itu saya gunakan untuk tambahan buat usaha dan sampai sekarang jualan saya lancar...”. Peningkatan modal dari para pedagang dapat dilihat dari tabel 5 dibawah ini.

Tabel 5. Peningkatan modal setelah menerima kredit PNPM

No	Nama	Modal awal (Rupiah)	Modal setelah kredit PNPM (Rupiah)	Presentase peningkatan modal (%)
1	Solikhah	-	1.000.000	100
2	Tuminah	1.500.000	3.500.000	133,3
3	Suminah	1.750.000	2.750.000	57,1
4	Tri Bawanti	500.000	1.500.000	200
5	Basiyem	1.500.000	2.500.000	66,6
6	Sugiyem	1.000.000	2.000.000	100
7	Sumarni	1.250.000	2.250.000	80
8	Karsini	650.000	1.650.000	153,8
9	Sutanti	500.000	1.500.000	200
10	Sulastri	750.000	1.750.000	133,3
	Jumlah	9.400.000	20.400.000	1224,1
	Rata-rata	940.000	2.040.000	122,4

Sumber: Hasil wawancara dengan informan yang telah diolah (Juni, 2010).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa sebelum menerima kredit PNPM. modal pedagang kecil rata-rata sedikit, tetapi setelah menerima kredit PNPM modal menjadi bertambah. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata prosentase peningkatan modal yaitu sebesar 124,4% dengan prosentase peningkatan modal tersendah 57,1% dan prosentase peningkatan modal tertinggi 200%.

Tabel 6. Peningkatan pendapatan pedagang setelah menerima kredit PNPM

No	Nama	Pendapatan sebelum kredit PNPM (Rupiah)	Pendapatan setelah kredit PNPM (Rupiah)	Prosentase peningkatan pendapatan (%)
1	Solikhah	500.000	750.000	50
2	Tuminah	1.450.000	1.850.000	27
3	Suminah	1.600.000	1.800.000	12,5
4	Tri Bawanti	700.000	1.150.000	64,28
5	Basiyem	1.250.000	1.500.000	20
6	Sugiyem	600.000	850.000	41,6
7	Sumarni	1.250.000	1.450.000	16
8	Karsini	850.000	1.000.000	17,6
9	Sutanti	650.000	900.000	38,4
10	Sulastri	900.000	1.200.000	33,3
	Jumlah	7.800.000	12.400.000	320,68
	Rata-rata	780.000	1.240.000	32,06

Sumber: Hasil wawancara dengan informan yang telah diolah (Juni, 2010).

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa setelah menerima kredit PNPM pendapatan pedagang rata-rata mengalami kenaikan. Hal ini dapat dilihat dari rata-rata prosentase peningkatan pendapatan sebesar 32,06% dengan peningkatan prosentase pendapatan rendah 12,5% dan peningkatan prosentase pendapatan tertinggi 64,28%. Semakin meningkatnya pendapatan pedagang akan meningkatkan pula kondisi kesejahteraan para pedagang kecil.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemberian kredit PNPM, sangat membantu masyarakat dalam segi sosial maupun ekonomi. Para pedagang memanfaatkan kredit tersebut untuk penambahan modal usaha maupun untuk membuka usaha baru. Terlihat bahwa sebelum mendapatkan kredit PNPM pendapatan pedagang kecil biasa-biasa saja tetapi setelah menerima kredit PNPM, pendapatan pedagang kecil mengalami peningkatan.

3. Hambatan Pedagang Kecil Dalam Proses Pemberian Kredit PNPM dan upaya yang Dilakukan Pedagang Kecil untuk Mengatasi Hambatan Tersebut

Proses pemberian kredit tidak selamanya berjalan lancar. Beberapa hambatan dialami oleh para pedagang. Berikut hambatan yang dialami pedagang kecil dalam proses pemberian kredit:

a. Kesulitan membayar angsuran

Kecamatan Kaliwungu ditemukan kredit macet tepatnya di desa Kradenan dan desa Kaliwungu. Penyebab kredit macet kerena ada beberapa anggota kelompok yang mengalami penunggakan pembayaran sampai beberapa kali angsuran. Seperti yang diungkapkan Ibu Suparniyati salah satu anggota yang menunggak sampai 6 kali angsuran, penuturannya berikut ini:

“...saya kesulitan mencari uang untuk membayar angsuran mbak, usaha saya dan suami saya lagi sepi. saya juga sudah berusaha mbak, saya sudah sana sini mencari pinjaman sampai ke renternir juga saya lakukan, tetapi pada tidak percaya sama saya karena anak saya banyak dan saya tidak punya jaminan mbak, sawah juga tidak punya”.

(Wawancara: Ibu Suparniyati, 5 juni 2010).

Agak tersendatnya angsuran dirasakan pula oleh Ibu Suparmi selaku ketua kelompok. Setiap tanggal angsuran ketua kelompok selalu memberitahu anggotanya untuk segera mengangsur. Tetapi saat mau menyetor masih ada anggota yang belum membayar, terpaksa ketua kelompok mendatangi rumah anggotanya untuk meminta uang angsuran. Seperti yang diungkapkan Ibu Suparmi berikut ini:

Misal ada anggota yang belum menyerahkan angsuran, saya datang rumah sekalian tanya kenapa kok belum membayar. Alasannya usahanya sedang sepi dan kebutuhan keluarganya sedang banyak. Kalau belum bisa bayar terpaksa saya yang nombokin dulu. Ini demi kelancaran angsuran, kalau telat sehari aja tidak bisa dapat IPTW.
(Wawancara: Ibu Suparmi, 10 Juli 2010)

Berdasarkan uraian-uraian diatas, terdapat berbagai permasalahan dalam hal kesulitan dalam hal pembayaran angsuran. Pada umumnya disebabkan karena usaha mereka lagi sepi dan waktu pembayaran angsuran bersamaan dengan kebutuhan rumah tangga yang lain. Peminjam yang tidak bisa membayar angsuran, PNPM MP memberi sanksi yaitu mereka tidak bisa mengajukan pinjaman kredit pada tahap berikutnya, pengelola PNPM MP tidak akan mengabulkannya. Berbeda halnya dengan peminjam yang lancar dalam mengangsur, akan diberi prioritas dalam pinjaman berikutnya.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi pedagang kecil antara lain sebagai ketua kelompok Ibu Sulastris merasa bertanggung jawab atas permasalahan diatas. Untuk mengantisipasi adanya kredit macet (tunggakan), ketua kelompok memberitahu kepada anggota kelompoknya jauh-jauh hari sebelum tanggal angsuran, sebagaimana penuturan Ibu Sulastris berikut ini, "Seminggu sebelum tanggal angsuran saya berusaha memberitahu anggota kelompok supaya mempersiapkan uang angsuran. Ini supaya uang angsuran bisa disetorkan tepat waktu, dan tidak ada angsuran yang macet..."(wawancara Ibu Sulastris, 4 Mei 2010).

Penuturan Ibu Karsini serupa dengan penuturan Ibu Sutanti sebagai berikut "alhamdulillah saya kalau mengangsur tidak pernah terlambat mbak, meskipun kebutuhan rumah juga banyak, tapi dari awal saya sudah cepak-cepak

uang untuk mengangsur, jadi pas waktunya tidak kerepotan mencari uang.” (wawancara Ibu Sutanti, 10 Juli 2010).

b. Sulit mengatur dana pinjaman dari PNPM

Kebutuhan masyarakat yang banyak dan keahlian manajerial yang kurang menyebabkan mereka mengalami kesulitan untuk mengatur dana pinjaman yang diberikan dari PNPM, dana yang seharusnya untuk menambah modal usaha tetapi karena kebutuhan yang banyak seringkali dana tersebut terpakai untuk kebutuhan rumah tangga yang lain. Hal ini bisa mengakibatkan usaha mereka tidak mengalami peningkatan atau cenderung turun.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala diatas yaitu pedagang kecil berupaya mengurangi pengeluaran rumah tangga dengan menggunakan dana pinjaman dari PNPM, kalau memang kebutuhannya tidak terlalu mendesak.

Berdasarkan pengamatan peneliti di lapangan, berbagai hambatan yang dialami pedagang kecil, tidak lepas dari peran pihak UPK itu sendiri. Pihak UPK juga kurang memberikan pembinaan secara intensif kepada pedagang kecil yang mengajukan pinjaman dana. Selain itu pelaksanaan sosialisasi dari pihak PNPM masyarakat juga sangat kurang, sehingga banyak dari masyarakat yang belum/ tidak paham mengenai PNPM itu sendiri, sehingga kemungkinan terjadinya kendala juga besar.

4. Hambatan PNPM dalam Proses Pemberian Kredit PNPM dan Upaya PNPM untuk Mengatasi Hambatan Tersebut

Hambatan tidak hanya dialami oleh pedagang kecil, tetapi dari pihak UPK juga mengalaminya. Adapun hambatan yang dijumpai di lapangan antara lain:

a. Prosedur pengembalian angsuran

Kecamatan Kaliwungu masih ditemukan adanya tunggakan angsuran di beberapa kelompok peminjam. Adapun penyebabnya antara lain keterlambatan dari anggota, dan angsuran yang belum disetor oleh pengurus kelompok. Keterlambatan dari anggota dikarenakan usaha mereka lagi macet. Bahkan

Tunggakan ada yang mencapai sampai 6 kali angsuran. Sebagaimana yang dikatakan oleh mbak Retno berikut ini;

“...PNPM ini intinya kan saling percaya, kita memberikan pinjaman karena percaya bahwa pedagang mampu mengembalikan pinjaman. Tapi ternyata di lapangan masih banyak ditemukan kelompok peminjam yang mengalami penunggakan angsuran. Penunggakan dikarenakan keterlambatan anggota maupun angsuran yang belum disetor oleh pengurus kelompok. Keterlambatan dari anggota dengan alasan usaha mereka lagi sepi. Bahkan di desa kradenan ditemukan beberapa kelompok yang anggotanya menunggak dari 3 sampai 6 kali angsuran dengan alasan usaha mereka lagi macet. Sedangkan di desa payungan ditemukan tunggakan karena belum disetorkan oleh pengurusnya”

(Wawancara Mbak Retno, 14 Juni 2010)

Upaya mengatasi hambatan diatas yaitu UPK akan memantau serta melakukan tahapan penyelesaian bersama pelaku desa sehingga diharapkan masalah tunggakan ini dapat diminimalisirkan dan bahkan menjadi 0% .

b. Penyalahgunaan dari pedagang kecil (nitip nama)

Hambatan lain yang dialami UPK yaitu UPK merasa dibohongi oleh pedagang, karena ada beberapa pedagang yang sudah dipercaya oleh UPK namanya dipakai oleh orang lain atau kerabatnya, atau peminjam yang nitip nama orang lain atau pinjam KTP lain. sehingga ketika terjadi tunggakan, yang bertanggung jawab tetap nama yang tercantum dalam KTP. ketika UPK menemui pihak nama yang tercatat dalam daftar pinjaman, nama yang bersangkutan tidak mau membayar dan meminta UPK untuk menagih sendiri kepada pihak yang meminjam nama orang tersebut. Hal ini menjadikan pihak UPK kerepotan.

Mbak Deisy mengatakan:

“...ada anggota yang meminjam KTP orang lain (nitip nama) sehingga ketika orang tersebut mengalami keterlambatan maka yang bertanggung jawab tetap nama yang tercantum di KTP.

(wawancara Mbak Deisy tanggal 4 Mei 2010).

Penuturam mbak deisy sesuai dengan yang diungkapkan mbak retno berikut ini:

“Terkadang ditemukan anggota yang nitip nama atau menggunakan nama orang lain. Akibatnya, misal anggota kelompok yang nitip nama tersebut mengalami keterlambatan dalam mengangsur yang harus bertanggung jawab tetep orang yang memiliki nama sesuai yang tercantum dalam proposal”.

(wawancara mbak Retno tanggal 14 Juni 2010)

Upaya UPK untuk mengatasi kasus seperti diatas yaitu dengan melakukan konfirmasi dengan TPK, melihat sejauh mana TPK bisa menyelesaikan, bila TPK masih belum bisa menyelesaikan. UPK berkoordinasi ulang dengan TPK dan aparat desa bagaimana memberi solusi kepada kelompok yang bermasalah, upaya lain yaitu dalam melakukan verifikasi dengan serius/ditanyai satu-satu setiap peminjam. Selain itu walaupun peminjam harus dipinjam KTP tetapi mereka harus mau bertanggung jawab apabila terjadi masalah.

c. Belum dipergunakan dengan baik dana kredit PNPM oleh pedagang kecil untuk tambahan modal

Sebenarnya dana PNPM diperuntukan untuk RTM yang produktif yaitu untuk penambahan modal usaha para pedagang. Akan tetapi dana kredit dari PNPM belum semuanya dipergunakan dengan baik oleh para pedagang kecil untuk tambahan modal usaha, tetapi dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan rumah tangga yang lain. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Sugiyem berikut ini :

“Sebenarnya uang dari pinjaman PNPM saya buat untuk tambahan modal usaha mbak, tapi waktu ada kebutuhan yang keluarga yang mendesak ya terpaksa uang itu dipakai dahulu, maklum kebutuhan rumah tangga banyak mbak.”

(wawancara Ibu Sugiyem, 4 Mei 2010)

Penuturan Ibu sugiyem tersebut dapat penulis simpulkan, penggunaan dana pinjaman yang salah sasaran tidak akan memaksimalkan usaha yang dijalani seseorang. Kemajuan usaha seseorang dipengaruhi oleh kemampuan mengelola dana yang sudah ada. Bagi pedagang yang benar-benar mempergunakan dananya untuk tambahan modal usaha tentunya hasil yang diperoleh akan lebih maksimal daripada pedagang yang menyalahgunakan pinjaman tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Sebagai pihak pemberi kredit, pengelola PNPM MP merasa bertanggung jawab atas masalah tersebut, seperti yang diungkapkan mbak Retno berikut ini:

“Tujuan pemberian kredit PNPM adalah untuk membantu permodalan bagi pedagang kecil yang ingin membuka usaha baru maupun untuk meningkatkan kegiatan usaha. Tetapi hanya sebagian kecil dari mereka yang benar-benar memanfaatkan dana pinjaman tersebut untuk tambahan modal,

kebanyakan mereka salahgunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumtif sehari-hari. Ini menjadi tanggung jawab kami untuk menangani masalah tersebut. Pengelola berusaha memberikan pengarahan atau pembinaan kepada para pedagang kecil agar memahami akan penggunaan dana tersebut.”

(wawancara Mbak retno, 14 juni 2010)

Berdasarkan penuturan mbak retno selaku ketua UPK PNPM MP, bahwa upaya yang harus dilakukan UPK dalam proses pemberian kredit yaitu melalui pendekatan personal maupun kelompok. Dengan pendekatan dan komunikasi yang baik, maka akan terjadi hubungan yang baik antara UPK dengan sasaran yaitu pedagang kecil. Dengan pembinaan yang sebaik-baiknya diharapkan dapat meningkatkan kondisi ekonomi pedagang kecil dalam hal ini meningkatkan pendapatan mereka.

C. Pembahasan dari Permasalahan Penelitian yang dihubungkan dengan Pedoman PNPM

Setelah peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mencari data yang berkaitan dengan pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil, ternyata dalam permasalahan penelitian yang peneliti amati terdapat perbedaan pelaksanaan pemberian kredit di Kecamatan Kaliwungu dengan ketentuan yang ada yang tercantum dalam buku pedoman PNPM-MP. Perbedaan itu antara lain:

1. Prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Pelaksanaan prosedur pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kaliwungu, mengalami sedikit perbedaan dengan pedoman PNPM Mandiri Perdesaan, perbedaannya sebagai berikut:

- a. Pedoman PNPM MP dituliskan bahwa dana pinjaman diberikan hanya kepada RTM yang memiliki usaha produktif. Tetapi dalam pelaksanaanya di lapangan, Pihak pengelola masih memberikan kredit ke masyarakat yang mampu. Pihak UPK berasumsi, pemberian kredit ini hanya diberikan kepada masyarakat miskin yang dipandang oleh UPK serta mampu mengembalikan angsuran, namun jika ada masyarakat yang mengajukan

pinjaman dari keluarga mampu serta dianggap mampu dalam hal pengembalian angsuran, UPK berkenan memberikan pinjaman.

- b. Saat perguliran dana ke kelompok seharusnya diadakan dulu Musyawarah Antar Desa, dengan tujuan untuk meminimalisir kendala-kendala saat proses pemberian kredit. Tetapi kenyataan di lapangan waktu pencairan dana langsung diberikan ke kelompok sasaran tanpa diadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) terlebih dahulu berakibat UPK tidak begitu paham mengenai kelompok sasaran. Sehingga kemungkinan terjadinya kendala sangat besar khususnya dari pihak pedagang kecil.
- c. Pembayaran angsuran seharusnya bunga/jasa yang diberikan tidak boleh melebihi dari standar lingkungan tetapi realisasi di lapangan masih ada bunga ganda. Maksud dari bunga ganda yaitu selain bunga yang berasal dari PNPM, di dalam kelompok sasaran masih dikenai beban tambahan jasa dari total pinjaman kelompok berdasarkan kesepakatan dari kelompok tersebut dimana tambahan jasa tersebut digunakan untuk kepentingan/administrasi kelompok sasaran sehingga total bunga yang dibayar masyarakat menjadi lebih besar.
- d. Pedoman PNPM menyebutkan bahwa dalam PNPM tidak menerima jaminan dalam bentuk apapun, tetapi kenyataan di lapangan di tingkat desa masih ada jaminan berdasarkan kesepakatan desa tersebut.

2. Pendapatan pedagang setelah menerima kredit dari PNPM

Ketentuan dari PNPM ini adalah menjawab persoalan mendasar dari masyarakat yaitu menyediakan lapangan kerja bagi rakyat miskin dan sekaligus menambah penghasilan bagi kelompok rakyat miskin (penanggulangan kemiskinan), yang tentunya dalam menyelesaikan persoalan tersebut proses pemberdayaan harus lebih ditinjalkan sehingga bisa dihasilkan manusia yang berkualitas.

Tetapi kenyataan di lapangan, memang benar masyarakat mendapatkan dana dari PNPM, yang dipergunakan pedagang untuk mengembangkan usaha dan berdampak pada pendapatan mereka yang rata-rata meningkat. Tetapi berdasarkan

pengamatan peneliti, dalam pelaksanaan kegiatan tersebut unsur pemberdayaanya itu sendiri masih sangat kurang. Akibatnya, masyarakat hanya mendapatkan manfaat dari segi kuantitas, sedangkan dari segi kualitas masih kurang.

3. Hambatan yang dihadapi pedagang kecil

Hambatan yang dialami oleh pedagang, tidak sepenuhnya disebabkan dari pihak pedagang itu sendiri, tetapi pihak UPK juga ikut andil didalamnya.

- a. Ketentuan PNPM menyebutkan dalam pelaksanaan PNPM harus dilaksanakan pembinaan secara intensif dari pengelola UPK kepada masyarakat khususnya kelompok sasaran. Tetapi kenyataan di lapangan, Pembinaan yang dilakukan oleh UPK masih sangat kurang, sehingga pedagang kecil yang mengalami hambatan saat proses pemberian kredit tidak dapat memperoleh solusi. Padahal jika masyarakat mengalami kendala, maka akan berdampak pada macetnya kredit. Pihak UPK hanya melakukan pembinaan pada saat awal tahun setelah dana program turun.
- b. Pedoman PNPM menyebutkan bahwa setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan PNPM harus diadakan sosialisasi tetapi kenyataannya, sosialisasi yang diberikan pengelola kepada masyarakat masih sangat kurang. Sehingga banyak masyarakat yang kurang begitu paham tentang PNPM itu sendiri bahkan ada yang tidak tahu.

D. Temuan Studi yang Dihubungkan Dengan Teori

Berdasarkan permasalahan penelitian yang dikemukakan di muka, temuan studi yang dihubungkan dengan teori yaitu mengenai:

1. Prosedur Pemberian Kredit PNPM MP

Seorang nasabah untuk memperoleh suatu kredit, harus melalui prosedur perkreditan, begitu juga bagi kreditur harus melalui prosedur-prosedur tertentu untuk dapat memberikan kredit. Menurut Thomas Suyatno et al (2003: 69) menyatakan bahwa, "Prosedur perkreditan meliputi tahap-tahap yaitu permohonan kredit, penyelidikan dan analisis kredit, penolakan atas permohonan kredit, persetujuan permohonan kredit, pencairan fasilitas kredit dan pelunasan fasilitas kredit".

Adapun tahapan dalam prosedur pemberian kredit PNPM MP di Kecamatan Kaliwungu adalah sebagai berikut:

a. Pembentukan kelompok

Pembentukan kelompok dilakukan untuk mencairkan dana pinjaman. Selain membentuk kelompok syarat lain untuk mencairkan dana kelompok peminjam harus mengumpulkan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga sebagai tambahan data. Untuk pembentukan kelompok diserahkan pada kelompok sasaran di setiap desa dengan tujuan agar menjadi efektif.

b. Pencairan Dana

Pencairan dana dilaksanakn oleh Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kecamatan Kaliwungu. Pengelola dari PNPM MP mendatangi kelompok yang mengajukan pinjaman. Diharapkan penerima bantuan dana PNPM bisa datang untuk mengambil dana tersebut, apabila terpaksa tidak bisa datang sendiri maka bisa diwakilkan oleh ketua atau anggota yang tentunya dengan persetujuan dan sepengetahuan dari anggota tersebut.

c. Pengembalian (Pembayaran angsuran)

Pembayaran angsuran dikumpulkan pada ketua kelompok masing-masing dan ketua kelompok mewakili anggotanya untuk menyetorkan ke kantor PNPM Kaliwungu. Angsuran dilakukan oleh ketua kelompok dirasakan lebih efektif karena lebih mudah dalam melakukan koordinasi. Pengelola PNPM dapat menanyakan langsung kepada ketua kelompok pada saat penyetoran mengenai kondisi anggotanya dan tentang penggunaan dana bantuan PNPM tersebut. Untuk pengembalian angsuran, PNPM membebani masyarakat pengguna dengan bunga 1,5% perbulan.

2. Pendapatan pedagang setelah menerima kredit PNPM Mandiri Perdesaan

Adanya kredit PNPM merupakan upaya untuk meningkatkan perluasan usaha dan peningkatan pendapatan. Dengan kata lain bahwa pemberian kredit ini mempunyai nilai yang besar bagi upaya pengembangan usaha pedagang kecil yang akan mampu meningkatkan pendapatan mereka.

Berdasarkan pengamatan lapangan yang penulis laksanakan di Kecamatan Kaliwungu rata-rata pendapatan pedagang kecil rendah, dengan pendapatan yang rendah tersebut tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari yang cenderung semakin meningkat. Upaya menutupi kekurangan biaya modal tersebut jalan satu-satunya yaitu dengan mengurangi modal. Sehingga sedikit demi sedikit modal usahanya akan habis. Walaupun ada pedagang kecil yang modalnya tetap, jika suatu saat terjadi kenaikan harga, akan mengakibatkan volume usaha mereka menjadi lebih sedikit dan pada akhirnya usaha mereka semakin menurun.

Usaha yang semakin menurun, mereka membutuhkan tambahan modal untuk bisa meningkatkan usaha yang mereka miliki, dengan adanya bantuan kredit PNPM kepada pedagang kecil bisa memberikan tambahan modal mereka sehingga dengan sendirinya bisa meningkatkan produktivitas dalam melakukan usaha. Berdasarkan hasil pengamatan pendapatan pedagang kecil setelah mendapat bantuan kredit PNPM mengalami kenaikan yang berbeda. Perbedaan tersebut disebabkan oleh adanya kondisi, keadaan, dan kebutuhan pedagang itu sendiri. Pedagang yang benar-benar menggunakan bantuan kredit guna menambah modal usahanya dan mau bersungguh-sungguh, ternyata pendapatan mereka akan mengalami peningkatan. pedagang kecil yang hanya menggunakan sebagian kreditnya untuk modal usaha dan selebihnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari pada umumnya hanya mengalami sedikit peningkatan, sedangkan pedagang kecil yang hanya menggunakan sebagian kreditnya untuk modal usaha dan selebihnya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari pada umumnya hanya mengalami sedikit pendapatan.

3. Hambatan yang dihadapi oleh Pedagang Kecil dalam Proses Pemberian Kredit PNPM dan Upaya untuk Mengatasi Hambatan tersebut

Proses pemberian kredit PNPM MP tidak selamanya berjalan lancar. Beberapa hambatan dialami oleh pedagang. Diantaranya adalah kesulitan mengangsur pinjaman. Masalah pengembalian pinjaman dirasakan sulit oleh para pedagang ketika usaha mereka kurang mengalami adanya peningkatan atau sedang mengalami penurunan.

Selain itu masih banyaknya pedagang yang menggunakan kredit PNPM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari padahal tujuan pemberian kredit PNPM MP adalah untuk membantu usaha-usaha kecil yang kekurangan modal.

Dari hasil penelitian hambatan yang sering dialami oleh pedagang dalam proses pemberian kredit di Kecamatan Kaliwungu adalah sebagai berikut:

- a. Kesulitan untuk mengangsur pinjaman PNPM karena usaha lagi sepi atau pendapatan mereka rendah.
- b. Sulitnya mengatur uang pinjaman karena kebutuhan mereka yang banyak.

Kredit diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian kredit adalah benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang dihadapi oleh pedagang kecil antara lain ketua kelompok mengadakan kesepakatan atau koordinasi dengan anggota kelompok untuk segera mengumpulkan uang angsuran kredit PNPM sebelum tanggal angsuran. Selain itu dari pihak pedagang kecil itu sendiri juga harus mengumpulkan uang hasil keuntungan dari berdagang sedikit demi sedikit agar di waktu dagangan lagi sepi, maka tidak akan kesulitan dalam mengangsur. Karena apabila pedagang kecil tepat dalam mengembalikan angsuran, maka pedagang akan menerima IPTW dan untuk pengajuan pada tahap berikutnya kredit akan diberikan dengan mudah.

4. Hambatan yang dihadapi oleh UPK dalam Proses Pemberian Kredit PNPM dan Upaya untuk Mengatasi Hambatan tersebut

Pelaksanaan program pemberian kredit PNPM MP kepada pedagang kecil tidak sepenuhnya berjalan lancar dan mencapai target, hal ini disebabkan:

- a. Terjadi tunggakan angsuran di beberapa kelompok peminjam disebabkan keterlambatan dari anggota, dan angsuran yang belum disetor oleh pengurus kelompok.
- b. Ada beberapa anggota kelompok peminjam yang nitip nama atau memakai nama orang lain untuk memperoleh pinjaman.

- c. Belum dipergunakan dana pinjaman dari PNPM MP tersebut oleh pedagang kecil untuk menambah modal usaha melainkan disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh PNPM dalam pelaksanaan pemberian kredit PNPM MP, antara lain:

- a. Memantau serta melakukan tahapan penyelesaian bersama pelaku desa untuk meminimalisir tunggakan yang terjadi.
- b. melakukan konfirmasi dengan TPK, melihat sejauh mana TPK bisa menyelesaikan, bila TPK masih belum bisa menyelesaikan UPK berkoordinasi ulang dengan TPK dan aparat desa bagaimana member solusi kepada kelompok yang bermasalah.
- c. Pembinaan yang difokuskan kepada kelompok sasaran.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

A. Kesimpulan

Permasalahan kemiskinan yang cukup kompleks membutuhkan campur tangan semua pihak secara bersama dan terkoordinasi. Namun, penanganannya selama ini tidak berkelanjutan. Peran usaha dan masyarakat pada umumnya juga belum optimal. Penanggulangan kemiskinan dengan menitikberatkan pada pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk menciptakan/meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraannya.

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan PNPM Mandiri dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan di wilayah perdesaan. Kecamatan Kaliwungu termasuk salah satu wilayah yang diprioritaskan untuk menerima program PNPM Mandiri Perdesaan ini karena sebagian besar penduduk Kecamatan Kaliwungu masuk ke dalam kategori masyarakat yang tingkat RTM nya cukup tinggi. PNPM MP memberikan pinjaman dana kepada masyarakat miskin yang mempunyai usaha produktif.

Pelaksanaan pemberian kredit di Kecamatan Kaliwungu telah menunjukkan keadaan yang cukup berarti. Hal ini ditunjukkan dengan perkembangan dana yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pelaksanaan implementasi pemberian kredit PNPM MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil dapat diambil kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Prosedur pemberian kredit PNPM MP dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil, meliputi:
 - a. Pembentukan kelompok

Pembentukan kelompok dilakukan untuk memenuhi salah satu syarat yang telah ditentukan. Pembentukan kelompok sepenuhnya diserahkan kepada masyarakat yang menjadi kelompok sasaran yang akan

mengajukan kredit. Jumlah anggota kelompok yang akan mengajukan kredit minimal 5 anggota. Syarat untuk mengajukan kelompok adalah tiap-tiap kelompok harus membawa fotocopy KTP dan fotocopy KK yang dilampirkan dalam proposal. Selain punya kelompok syarat lain untuk mengajukan kredit adalah tiap anggota kelompok harus mempunyai usaha produktif dari berbagai sektor, anggota harus jelas keberadaanya, kelompok memiliki administrasi pembukuan yang sederhana.

b. Pencairan dana

Pencairan dana dilakukan langsung oleh UPK setelah mendapat rekomendasi dari TIM verifikasi bahwa kelompok tersebut memang layak untuk dicairkan dan tidak mengalami masalah tunggakan. Dana yang cair kepada pedagang sangat tergantung pada survey studi kelayakan yang dilakukan oleh Tim Verifikasi. pengajuan pertama dana yang turun tidak sesuai dengan pengajuan karena adanya beberapa pertimbangan antara lain kelompok baru yang masih dalam percobaan, jenis usaha, kemampuan kelompok sasaran dalam membayar angsuran yang disesuaikan dengan penghasilan mereka dan menyelami rekomendasi dari tim verifikasi.

c. Pengembalian Angsuran

Berdasarkan kesepakatan jangka waktu pengembalian angsuran untuk kredit PNPM Mandiri Perdesaan antara 10 dan maksimal 12 bulan. Jangka waktu tersebut disesuaikan dengan perjanjian awal saat mengajukan kredit. Angsuran yang disetorkan ke UPK dikenai bunga jasa 1,5 %. Berdasarkan kesepakatan kelompok sasaran, beberapa kelompok masih mengenakan tambahan beban administrasi. Jumlah dari beban administrasi tersebut kelompoklah yang menentukan dan beban tersebut mereka bayar untuk perkembangan kelompok. dana yang turun ke kelompok, Setiap bulan sesuai dengan tanggal pencairan dana ketua kelompok mengumpulkan semua angsuran (Pokok dan jasa) dari masing-masing anggota lalu diberikan ke TPK dan TPK menyetorkan langsung ke UPK. Tetapi kenyataan di lapangan banyak angsuran yang dibayarkan

oleh ketua kelompok langsung diserahkan ke UPK untuk menghindari kredit macet.

2. Pendapatan Pedagang setelah menerima kredit dari PNPM Mandiri Perdesaan Kaliwungu

Adanya kredit PNPM Mandiri Perdesaan ini merupakan upaya meningkatkan pendapatan pedagang kecil. dengan kata lain pemberian kredit ini bagi pedagang kecil sebagai upaya pengembangan usaha yang diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan mereka. Berdasarkan pengamatan lapangan yang peneliti lakukan di Kecamatan Kaliwungu pendapatan masyarakat rata-rata rendah. Bantuan kredit PNPM sangat membantu masyarakat dalam segi sosial maupun ekonomi. Terlihat bahwa sebelum mendapatkan kredit pendapatan pedagang kecil biasa-biasa saja tetapi setelah menerima kredit pendapatan pedagang kecil mengalami peningkatan yang berbeda-beda.

3. Hambatan yang dihadapi oleh pedagang kecil dalam proses pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan yaitu:

a. Kesulitan membayar angsuran

Agak tersendaknya angsuran disebabkan karena pedagang kecil mengalami kesulitan membayar angsuran, ini disebabkan usaha yang sedang mereka jalankan sedang sepi, sedangkan waktu pembayaran angsuran bersamaan dengan kebutuhan rumah tangga yang lain. Upaya untuk mengatasi kendala tersebut adalah ketua kelompok memberitahu kepada anggota kelompoknya jauh-jauh hari sebelum tanggal angsuran supaya anggota kelompok bisa mempersiapkan sebelumnya, sehingga pembayaran angsuran bisa tepat waktu.

b. Sulit mengatur dana pinjaman PNPM

Kesulitan mengatur dana pinjaman disebabkan karena kebutuhan masyarakat yang banyak dan keahlian manajerial yang kurang. Akibatnya dana yang sebenarnya digunakan untuk tambahan modal usaha, seringkali dana tersebut terpakai untuk kebutuhan yang lain. Hal ini berakibat usaha mereka tidak mengalami peningkatan atau cenderung turun. Upaya yang

dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah meminimalisir atau menghindari pengeluaran rumah tangga dengan menggunakan dana PNPM jika kebutuhan tidak mendesak sekali.

4. Hambatan yang dihadapi oleh UPK dalam proses pemberian kredit PNPM dan upaya untuk mengatasinya

Hambatan yang dihadapi UPK dalam proses pemberian kredit antara lain:

- a. Terjadi tunggakan angsuran di beberapa kelompok peminjam disebabkan keterlambatan dari anggota, dan angsuran yang belum disetor oleh pengurus kelompok.
- b. Ada beberapa anggota kelompok peminjam yang nitip nama atau memakai nama orang lain untuk memperoleh pinjaman.
- c. Belum dipergunakan dana pinjaman dari PNPM MP tersebut oleh pedagang kecil untuk menambah modal usaha melainkan disalahgunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang mendesak.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh PNPM dalam pelaksanaan pemberian kredit PNPM MP, antara lain:

- a. Memantau serta melakukan tahapan penyelesaian bersama pelaku desa untuk meminimalisir tunggakan yang terjadi.
- b. Melakukan konfirmasi dengan TPK, melihat sejauh mana TPK bisa menyelesaikan permasalahan tersebut, bila TPK masih belum bisa menyelesaikan UPK berkoordinasi ulang dengan TPK dan aparat desa bagaimana memberi solusi kepada kelompok yang bermasalah. Selain itu dalam melakukan verifikasi dengan serius/ditanyai satu-satu setiap peminjam. walaupun peminjam harus dipinjami KTP tetapi mereka harus mau bertanggung jawab apabila terjadi masalah
- c. Pembinaan dari UPK yang difokuskan kepada kelompok sasaran.

Setelah peneliti melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi untuk mencari informasi yang berkaitan dengan pemberian kredit PNPM Mandiri

Perdesaan dalam meningkatkan pendapatan pedagang kecil, ternyata dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat perbedaan dengan ketentuan yang ada dalam pedoman PNPM MP. Perbedaannya sebagai berikut:

- Pedoman PNPM MP dituliskan bahwa dana pinjaman diberikan hanya kepada RTM yang memiliki usaha produktif. Tetapi dalam pelaksanaanya di lapangan, Pihak pengelola masih memberikan kredit ke masyarakat yang mampu.
- Saat penguliran dana ke kelompok seharusnya diadakan dulu Musyawarah Antar Desa, Tetapi kenyataan di lapangan waktu pencairan dana langsung diberikan ke kelompok sasaran tanpa diadakan Musyawarah Antar Desa (MAD) terlebih dahulu.
- Pembayaran angsuran seharusnya bunga/jasa yang diberikan tidak boleh melebihi dari standar lingkungan tetapi realisasi di lapangan masih ada bunga ganda.
- Pedoman PNPM menyebutkan bahwa dalam PNPM tidak menerima jaminan dalam bentuk apapun, tetapi kenyataan di lapangan di tingkat desa masih ada jaminan berdasarkan kesepakatan desa tersebut.
- Berdasarkan ketentuan PNPM, dalam pelaksanaan program ini harus lebih menekankan pada unsur pemberdayaan, untuk menghasilkan manusia yang berkualitas. Tetapi pelaksanaan di lapangan, unsur pemberdayaan masih sangat kurang, sehingga yang diperoleh masyarakat hanya manfaat dari segi kuantitas bukan kualitas.
- Ketentuan dalam PNPM bahwa dalam pelaksanaanya proses pemberdayaan harus lebih ditonjolkan, tetapi kenyataan di lapangan proses pemberdayaan masih sangat kurang.
- Ketentuan PNPM menyebutkan dalam pelaksanaan PNPM, harus dilaksanakan pembinaan secara intensif dari pengelola UPK kepada masyarakat. Tetapi kenyataan di lapangan, Pembinaan yang dilakukan oleh UPK masih sangat kurang.

- Pedoman PNPM menyebutkan bahwa setiap ada kegiatan yang berhubungan dengan PNPM harus diadakan sosialisasi tetapi kenyataannya, sosialisasi yang diberikan pengelola kepada masyarakat masih sangat kurang.

B. Implikasi

Bertolak dari kesimpulan dalam penelitian, maka dapat disajikan suatu implikasi teoritis dan praktis sebagai berikut:

1. Implikasi teoritis

Hasil penelitian ini menguatkan teori dalam dunia perkreditan bahwa “kredit merupakan pinjaman yang diberikan kreditur kepada debitur untuk meningkatkan usahanya, untuk mencapai keuntungan yang dicita-citakan”. Pelaksanaan pemberian kredit PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Kaliwungu ini pihak pengelola PNPM memberikan dana pinjaman kepada pedagang kecil untuk membantu pedagang kecil dalam mengembangkan usaha dan mendirikan usaha-usaha baru. Sehingga dengan usaha mereka yang semakin berkembang, masyarakat akan memperoleh pendapatan yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka. Hasil dari pemberian kredit ini selaras juga dengan teori yang dikemukakan oleh Shofia Arini dalam hasil penelitiannya yang berjudul “Implementasi Pemberian Kredit Program Pengembangan Kecamatan dalam Meningkatkan Pendapatan Golongan Ekonomi Lemah di Kecamatan Punung” menyebutkan bahwa pemberian kredit dari PPK dapat meningkatkan keadaan ekonomi & sosial masyarakat khususnya pedagang golongan ekonomi lemah terutama dari segi pendapatan yang berdampak pada kesejahteraan.

2. Implikasi Praktis

Berdasarkan hasil penelitian ini, dengan diketahui dampak dari pemberian kredit PNPM kepada pedagang kecil, yaitu meningkatnya pendapatan pedagang kecil, yang berdampak kesejahteraan mereka juga ikut meningkat. Berdasarkan dampak dari pemberian kredit tersebut tersebut, maka program ini perlu untuk dilanjutkan ke periode berikutnya mengingat kemampuan masyarakat miskin dalam mendapatkan modal masih sangat minim. Tetapi pelaksanaan program ini

tidak terlepas dari hambatan-hambatan yang dialami UPK kecamatan Kaliwungu dalam memberikan kredit kepada pedagang kecil yaitu adanya tunggakan angsuran/kredit macet, pemakaian nama peminjam, dan belum dipergunakan sepenuhnya dana dari PNPM untuk tambahan modal usaha. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi pengurus UPK di Kecamatan Kaliwungu dalam menentukan kebijakan-kebijakan antara lain:

- a. Kebijakan dalam mengurangi/ mengantisipasi adanya kredit macet di Kecamatan Kaliwungu.
- b. Kebijakan untuk mengevaluasi kinerja dari pihak UPK supaya UPK bisa lebih bertanggung jawab.
- c. Kebijakan untuk memberikan solusi mengenai permasalahan-permasalahan yang dialami oleh masyarakat peminjam khususnya.
- d. Kebijakan dalam meningkatkan kualitas, dengan lebih menonjolkan pada proses pemberdayaan masyarakat.

C. Saran

Berdasarkan pada hasil penelitian dan Implikasi, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Saran untuk pengelola UPK

- a) Para pengelola PNPM seharusnya bisa tegas terhadap peraturan PNPM.
- b) Sosialisasi PNPM kepada pedagang masih sangat kurang, seharusnya pengurus UPK sering-sering mengadakan sosialisasi mengenai informasi tentang PNPM mandiri Perdesaan kepada pedagang kecil.
- c) Seharusnya pengurus UPK melakukan pendampingan SDM dan pengembangan usaha yang dikelola oleh pedagang kecil.
- d) Pengurus UPK seharusnya melakukan tahapan pembinaan yang teratur dan insentif kepada usaha masyarakat khususnya pedagang kecil yang mengajukan pinjaman sesuai dengan tahapan pembinaan yang sesuai dengan ketentuan PNPM, sehingga kendala yang dihadapi pedagang kecil dapat teratasi dengan solusi-solusi yang diberikan oleh pengurus UPK.

- e) Mengingat dana bantuan kredit PNPM belum dipergunakan sesuai dengan sasaran hendaknya pengelola mengadakan pendekatan kepada pedagang kecil. Sehingga dengan pendekatan tersebut diharapkan pedagang kecil mempunyai kesadaran untuk mempergunakan dana pinjaman sesuai dengan tujuan kredit PNPM.
 - f) Hendaknya pengurus UPK memiliki data dasar mengenai pendapatan pedagang kecil sebelum dan sesudah mendapatkan kredit PNPM Mandiri Perdesaan.
 - g) Hendaknya proses PNPM lebih menekankan terhadap sisi nilai, tindakan dan meningkatkan kualitas, bukan hanya mengejar kuantitas.
2. Saran untuk Pedagang kecil di Kecamatan Kaliwungu selaku kelompok sasaran
- a) Agar dana yang cair dipergunakan sesuai dengan tujuan pemberian kredit, karena dengan penggunaan yang tepat sasaran akan diperoleh hasil yang maksimal yaitu peningkatan pendapatan yang berdampak pada kondisi kesejahteraan mereka.
 - b) Sebaiknya kelompok bisa lebih kompak dan tidak bersikap individualisme.
 - c) Karena tidak ada jaminan dalam proses pengajuan kredit, hendaknya pedagang kecil tidak menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan oleh pengelola PNPM. Seharusnya mereka sadar dan bertanggung jawab untuk mengembalikan pinjaman tepat waktu agar manfaat dana tersebut dapat dirasakan merata oleh masyarakat Kaliwungu.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Dalam Negeri RI. 2007. *Pedoman Umum PNPM Mandiri*. Jakarta: Tim Pengendali PNPM Mandiri.
- Departemen Dalam Negeri RI. 2008. *PTO*. Jakarta: Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan.
- Departemen Dalam Negeri RI. 2008. *PTO Penjelasan*. Jakarta: Tim Koordinasi PNPM Mandiri Perdesaan.
- Sutopo, H.B. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif : dasar teori dan terapannya dalam penelitian*. Surakarta: UNS Press.
- Kasmir. 2002. *Dasar-dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Keputusan Menteri Keuangan No. 40/KMK.06/2003 Tentang Usaha Mikro.
- Lexy J. Moleong. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remadja Rosdakarya.
- Nana Syodih Sukmadinata. 2008. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pendapatan.2010. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pendapatan>. Diunduh pada tanggal 9 Maret 2010.
- Shofia Arini. 2008. *Skripsi: Implementasi Pemberian Kredit Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Golongan Ekonomi Lemah di Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo*. Surakarta: FKIP UNS.
- Suharjono. 2003. *Manajemen Perkreditan Usaha Kredit dan Menengah*. Makasar: UPP AMP YPKN.

Thomas Suyatno, dkk. 2003. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta : PT Gramedia.

Veithzal Rifai & Adrian Permata. 2006. *Credit Manajement FandBook (Teori, Konsep, Prosedur dan Aplikasi Panduan Praktis Mahasiswa, Bankir dan Nasabah)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Winarno Surakhmad. 2004. *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito.

